



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT II

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 dapat diselesaikan. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Laporan Kinerja Unit Kerja Inspektorat II merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, sebagai salah satu instrumen tata kelola Inspektorat II, alat kendali dan pendorong terjadinya peningkatan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini menginformasikan uraian singkat mengenai tupoksi dan struktur organisasi, isu strategis, rencana dan perjanjian kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran kegiatan di Inspektorat II, termasuk analisis capaian kinerja, serta simpulan dan rekomendasi.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun Anggaran 2025 dan semua pihak yang telah bekerja serta bersinergi untuk mencapai target kinerja Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat menjadi salah satu acuan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II dalam rangka mencapai tujuan dan mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

Jakarta, 15 Januari 2026

Inspektur II,

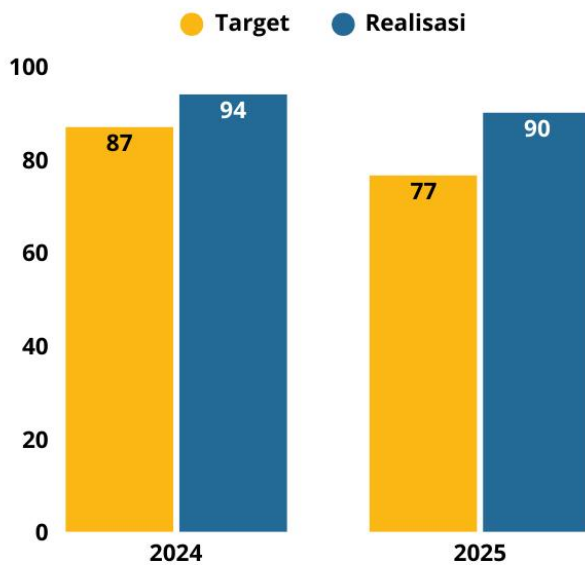
Nikmatullah



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Sasaran Kegiatan 2.2

IKK 2.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II



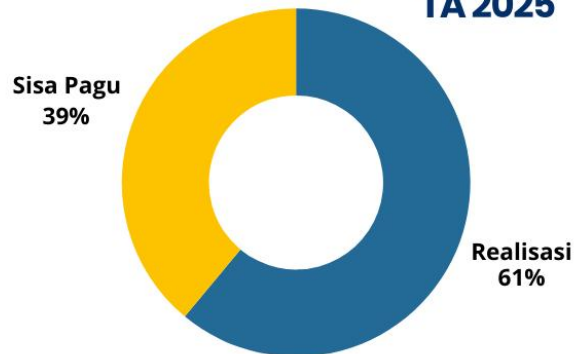
Perubahan Perjanjian Kinerja

Perubahan PK TA 2025 dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Juli, September dan Desember 2025.

Anggaran PK Awal : Rp2.065.746.000
 Anggaran PK Revisi : Rp2.116.198.000

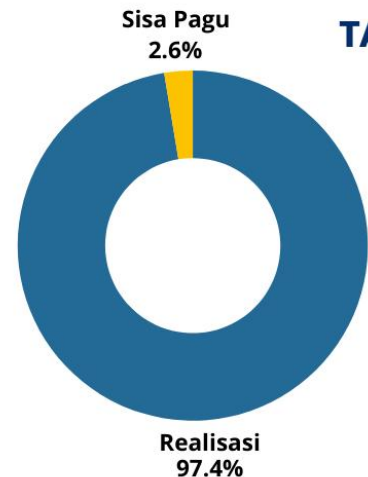
Realisasi Anggaran

TA 2025



Pagu : Rp2.116.198.000

TA 2024



Pagu : Rp1.668.344.000

Isu Strategis

1. Berdasarkan analisa beban kerja dan jumlah SDM Inspektorat II masih belum sesuai dengan kebutuhan Auditor untuk mengawasi 226 (dua ratus dua puluh enam) satuan kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki alokasi anggaran Rp37,3 Triliun;
2. Hasil kegiatan pengawasan berupa Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan tata kelola dan pengambilan keputusan strategis oleh Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Banyaknya kegiatan pengawasan yang jumlahnya melebihi Program Pengawasan yang telah ditetapkan antara lain ADTT Usulan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam, ADTT Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK RI, Reviu Penelitian Administrasi Kontrak Tahun Jamak, Reviu Perpanjangan Izin Kontrak Tahun Jamak, Reviu Revisi Anggaran, dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor Eksternal

1. Terjalinnnya hubungan yang baik antar pemangku kepentingan lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian PU maupun antar kementerian/lembaga (K/L);
2. Adanya koordinasi yang baik dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan pengendalian internal Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai unit organisasi yang diawasi;
3. Adanya kebijakan yang mendukung pengawasan dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan terarah.

Faktor Internal

1. Komitmen Pimpinan untuk mendorong seluruh pegawai Inspektorat II melaksanakan tugas pengawasan intern yang berkualitas sesuai dengan nilai core value ASN yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);
2. Adanya peningkatan pengetahuan pegawai Inspektorat II dalam mendukung pengawasan intern di bidang Bina Marga diantaranya Diklat Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK), Diklat Evaluasi Tata Kelola TI dan Audit TIK, Diklat Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Diklat Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Diklat Audit BMN, Audit Keamanan SPBE Sektor Pemerintahan, Sosialisasi Pedoman Telaah Sejawat Ekstern, dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
3. Adanya dukungan manajemen pengawasan dari Subbagian Tata Usaha dalam menyediakan data, informasi dan memfasilitasi sarana prasarana serta pengadministrasian untuk membantu kegiatan pengawasan intern dan pelaporan kepada pimpinan;
4. Pengimplementasian manajemen risiko dalam mencapai tujuan pencapaian kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektor II.

Permasalahan

1. Banyaknya penugasan yang bersifat urgent dan menjadi skala prioritas sesuai arahan pimpinan serta tidak dapat ditunda sehingga penyusunan laporan beberapa kegiatan pengawasan tidak dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Nilai Telaah Sejawat Intern Proses AREPP di Inspektorat II belum mencapai target karena terdapat catatan dari evaluator.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PKPT;
2. Meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Inspektorat II, berpedoman pada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR dan melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dalam hal peningkatan tata kelola Pengawasan di Inspektorat II;
3. Meningkatkan kapabilitas pegawai Inspektorat II dalam mendukung pengawasan intern melalui pendidikan dan pelatihan serta mendorong peran aktif dan kepedulian seluruh auditor dalam setiap kegiatan AREPP Inspektorat II.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
1.3.1 Struktur Organisasi	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	5
1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis	5
1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan	6
1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia	8
1.4 Sarana dan Prasarana	12
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik	12
1.4.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi	12
1.5 Isu Strategis	16
1.6 Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Rencana Strategis	19
2.1.1 Visi dan Misi	19
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi	20
2.1.3 Program dan Kegiatan	24
2.2 Perjanjian Kinerja	25
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal	25
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	25
2.2.3 Kronologi Perubahan PK	26
2.3 Metode Pengukuran	28
2.4 Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Rencana Strategis	29
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra	30
2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis	30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas	33
3.2 Capaian Kinerja	34
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja	34
3.2.2 Analisis Capaian <i>Output</i> Kegiatan	37
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja	40
3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	40
3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah	41
3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Unit Kerja Lain (<i>Benchmarking</i>)	41
3.4 Analisis Realisasi Anggaran	42
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	42
3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025	47
3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya	49
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Simpulan Umum	53
4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan	53
4.1.2 Permasalahan	54
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	54
LAMPIRAN	55
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	56
LAMPIRAN 2 BUKTI DUKUNG CAPAIAN KINERJA	65
LAMPIRAN 3 PENGHARGAAN	67
LAMPIRAN 4 BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA	68
LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI KEGIATAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pegawai Inspektorat II	4
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Perubahan Jabatan	6
Tabel 1. 3 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat dan Golongan	6
Tabel 1. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan.....	6
Tabel 1. 5 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender	8
Tabel 1. 6 Rekapitulasi Pegawai yang Selesai Menempuh Pendidikan DIV	8
Tabel 1. 7 Rekapitulasi Pegawai yang Selesai Menempuh Pendidikan S2	9
Tabel 1. 8 Rekapitulasi Pegawai yang Sedang Menjalani Tugas Belajar	9
Tabel 1. 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Inspektorat II	9
Tabel 1. 10 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	10
Tabel 1. 11 Daftar Barang Milik Negara Inspektorat II Tahun 2025	12
Tabel 1. 12 Perbandingan Kebutuhan dan Realisasi Auditor Inspektorat II.....	16
Tabel 1. 13 Rekapitulasi Progres Pengawasan Intern Inspektorat II pada Direktorat Jenderal Bina Marga TA 2025.....	17
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2025 (PK Awal)	25
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2025 (PK Revisi Akhir)	26
Tabel 2. 4 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2.....	29
Tabel 2. 5 Realisasi Kinerja Inspektorat II tahun 2025-2029	30
Tabel 2. 6 Tujuan dan Sasaran Strategis ke-6 (SS-06) Kementerian PU.....	30
Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal 2025-2029	31
Tabel 2. 8 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II 2025-2029.....	31
Tabel 3. 1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat II Tahun 2024.....	33
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan 1.2	34
Tabel 3. 3 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II	35
Tabel 3. 4 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II.....	35
Tabel 3. 5 Perhitungan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi LHP	36
Tabel 3. 6 Capaian <i>Output</i> Kegiatan Inspektorat II Tahun 2025	37
Tabel 3. 7 Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	40
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah.....	41
Tabel 3. 9 Perbandingan Kinerja Inspektorat II dengan Unit Kerja Lain	42
Tabel 3. 10 Matriks Revisi Anggaran Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025	43
Tabel 3. 11 Alokasi Anggaran Inspektorat II TA 2025	46
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2025	47
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025.....	49
Tabel 3. 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat II TA 2020 s.d 2025 ..	50
Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi <i>Output</i> Inspektorat II Tahun 2025.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat II	3
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Inspektorat II	5
Gambar 1. 3 Diagram Pegawai berdasarkan Kelompok Jabatan dan Gender.....	7
Gambar 1. 4 Diagram Pegawai berdasarkan Golongan dan Gender.....	7
Gambar 1. 5 Diagram Pegawai berdasarkan Usia dan Gender	11
Gambar 1. 6 Diagram Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Usia	11
Gambar 1. 7 Tampilan dan Menu pada <i>Website ieMonitoring</i>	13
Gambar 1. 8 Tampilan TNDE Versi 2 Kolaborasi	13
Gambar 1. 9 Tampilan dan Menu pada <i>Website e-PTLHP</i>	14
Gambar 1. 10 Tampilan Awal <i>Website e-HRM</i>	14
Gambar 1. 11 Tampilan Awal <i>Website e-Kinerja</i>	15
Gambar 1. 12 Tampilan Aplikasi Satu Bravo	15
Gambar 1. 13 Tampilan Site Microsoft 365.....	16
Gambar 2. 1 Peta Strategi Inspektorat Jenderal.....	24
Gambar 2. 2 Perubahan PK Revisi ke-1.....	26
Gambar 2. 3 Perubahan PK Revisi ke-2.....	27
Gambar 2. 4 Perubahan PK Revisi Akhir.....	28
Gambar 3. 1 Pohon Anggaran DIPA Awal	46
Gambar 3. 2 Pohon Anggaran DIPA Revisi	46
Gambar 3. 3 Diagram Realisasi Anggaran Inspektorat II TA 2020 – 2025	51

DAFTAR SINGKATAN

ADTT	: Audit dengan Tujuan Tertentu
AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBN	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APH	: Aparat Penegak Hukum
ASN	: Aparatur Sipil Negara
APIP	: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKSP	: Indikator Kinerja Sasaran Program
Itjen	: Inspektorat Jenderal
KRO	: Klasifikasi Rincian Output
LHADTT	: Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
MR	: Manajemen Risiko
OK	: <i>Output</i> Kegiatan
PK	: Perjanjian Kinerja
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
POK	: Petunjuk Operasional Kegiatan
Renstra	: Rencana Strategis
RO	: Rincian Output
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Sasaran Kegiatan
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran
TI	: Teknologi Informasi
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UPKPT	: Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengatur bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman kepada:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tanggal 9 Desember 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029.
- c. Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 34/KPTS/Ij/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 47.1/KPTS/IJ/2024 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025;
- d. Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1.2 Tugas dan Fungsi

Sebagai panduan bagi setiap Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Menteri Pekerjaan Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan pekerjaan umum pada Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

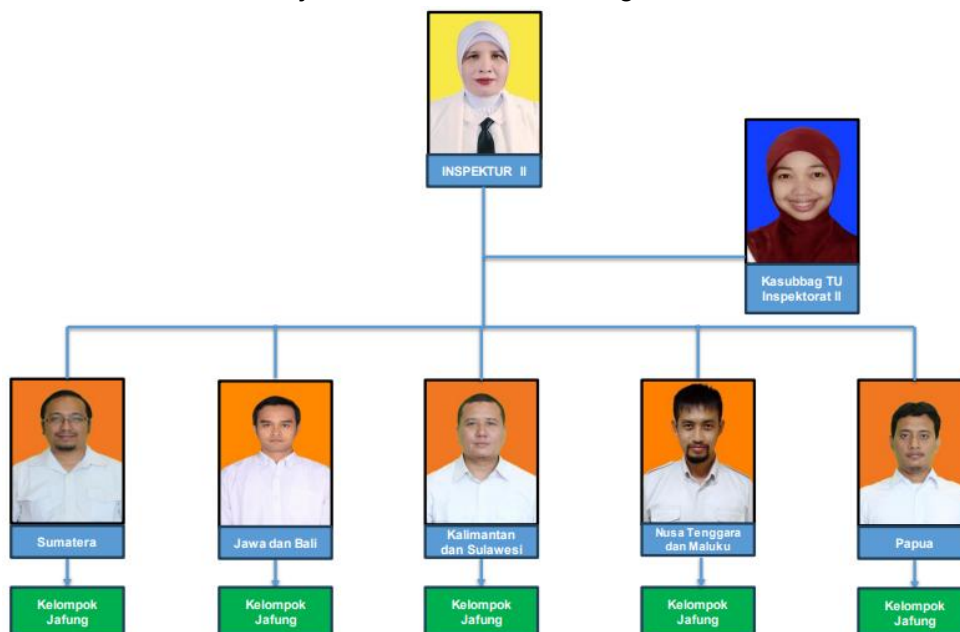
- a. Penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya termasuk pengawasan wajib;

- d. Pemantauan dan pengendalian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, serta koordinasi pengawasan dengan penegak hukum dan instansi lain terkait;
- e. Pelaksanaan program pengembangan, penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan intern;
- f. Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan;
- g. Pelaporan kinerja; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat II berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/Ij/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat II

Sumber: Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/Ij/2025

Pegawai yang ditempatkan di Inspektorat II sebanyak 39 orang pegawai terdiri dari 36 orang PNS dan 3 orang PPPK, sesuai dengan:

- a. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/Ij/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. Surat Perintah Inspektur II Nomor 01/SPRIN/Ib/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Tentang Penetapan Anggota Koordinator Pengawasan Wilayah di Inspektorat II.

Rincian pegawai Inspektorat II dituangkan pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Pegawai Inspektorat II

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Nikmatullah, S.T., M.T.	196706011998032003	Inspektur II
Wilayah Sumatera			
2	Frans Pratama, S.T., M.Sc.	198203092009121001	Auditor Ahli Madya
3	Dina Septyana, S.T., M.PSDA	198812032010122003	Auditor Ahli Muda
4	Dian Ekowati Prabuningtyas, S.H.	198910302014022006	Auditor Ahli Muda
5	Uun Khoiriyah, S.E., M.Ak	199302282018022001	Auditor Ahli Pertama
6	Harian Sabta, S.ST.	199404092019031005	Auditor Ahli Pertama
7	Firda Wasyiah, S.Tr.Ak.	199802132019122001	Auditor Ahli Pertama
Wilayah Jawa dan Bali			
8	I Made Parindra Wibawa, S.T., M.Eng.	198802232010121003	Auditor Ahli Madya
9	Henny Realita Purba, S.T., M.T.	198806252010122003	Auditor Ahli Muda
10	Danang Indrapraja, S.E.	198502182014021002	Auditor Ahli Muda
11	Rullyta Sari, S.E.	198910102018022001	Auditor Ahli Pertama
12	Talitha Puspa Melati, S.T., M.T.	199507192018022001	Auditor Ahli Pertama
13	Asrof Vicky Ramdhani, A.Md.Ak.	200101012021011001	Karyasiswa D-IV
Wilayah Kalimantan dan Sulawesi			
14	Ricki Fajri Sofyan, S.T., MSCE.	197910042008011014	Auditor Ahli Madya
15	Dicky Edvant Debrianto, S.T., MSCE.	198612182010121003	Auditor Ahli Muda
16	Yesi Agustina, S.E.	198808102009122001	Auditor Ahli Muda
17	Khanifah Wida Aristanti, S.E., M.B.A.	198810162018022001	Auditor Ahli Pertama
18	Edi Yasmoro, S.E.	199204022019031009	Auditor Ahli Pertama
19	Khalifa Muhammad Haekal, A.Md.Ak.	199907022021011003	Auditor Terampil
Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara			
20	Dimas Bangun Kusuma Muda, S.E., M.T.	198603202110121007	Auditor Ahli Muda
21	Paini, S.Sos, M.A.	196904011995022001	Auditor Ahli Madya
22	Yusuf Arya Pratama, S.T.	199312082018031001	Auditor Ahli Pertama
23	Muhammad Hafizh, S.Kom.	199406302022031005	Auditor Ahli Pertama
24	Arindya Miftah Ayu Rahma, A.Md.Ak.	199905082021012003	Karyasiswa D-IV
Wilayah Papua			
25	Achirul Aprisal Annas, S.T., M.MT.	198404092010121002	Auditor Ahli Madya
26	Syarief Fathoni, S.T., M.T.	198301202010121002	Auditor Ahli Muda
27	Utami Budi Wardani, S.E.	199012022014022003	Auditor Ahli Muda
28	Yudhistira Adi Nugroho, S.T.	199001212015031004	Auditor Ahli Pertama
29	Khikmatun Nafi'ah, S.E. M.Ak	199408282018022001	Auditor Ahli Pertama
Subbagian Tata Usaha			
30	Nur Aini Utami, S.E., M.Ak	198503012010122004	Kepala Subbagian Tata Usaha
31	Tias Anggoro Mulyo, S.Sos	198302032010121001	Analisis SDM Aparatur
32	Agustina Wulandari, S.Kom	198108072014122001	Arsiparis Ahli Pertama
33	Vicky Anggia Ferdina, S.T.	199503272022032010	Auditor Ahli Pertama
34	Silvina Valentin, S.T.	199612172022032017	Auditor Ahli Pertama
35	Muhammad Rifqi, S.T.	199804292022031007	Auditor Ahli Pertama
36	Ninda Oktriani, S.T.	199810042022032007	Auditor Ahli Pertama
37	Hanni Ananthama Mardhika, S.E.	198604042025211058	Penata Layanan Operasional
38	Wachyudi	198003282025211023	Operator Layanan Operasional
39	Karyo Bin Kadmin	198101132025211026	Operator Layanan Operasional

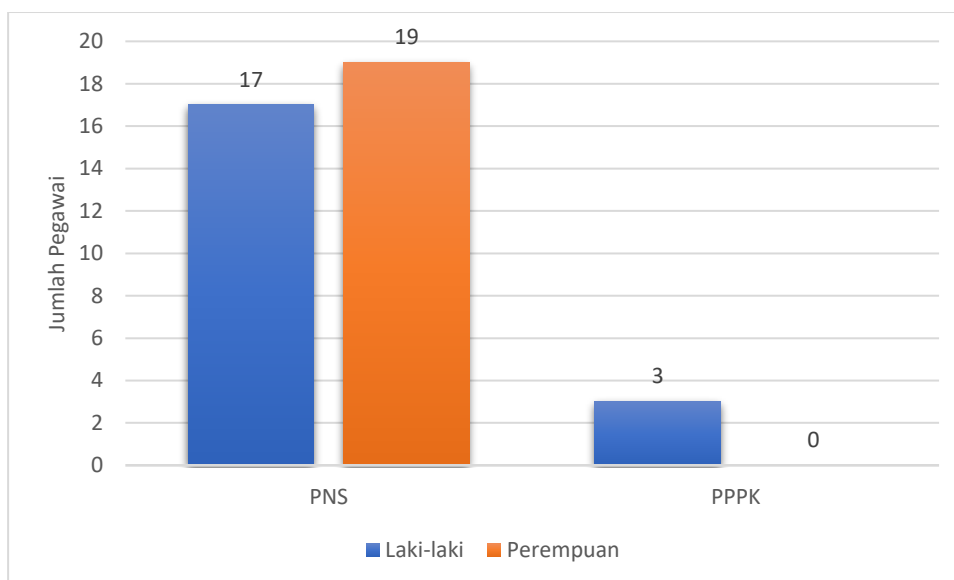
1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah, sehingga diperlukan tidak hanya kuantitas yang cukup namun juga kualitas personil yang memadai. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia seiring dengan tantangan yang dihadapi akan sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap *stakeholders*.

Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai. Pengembangan keterampilan SDM harus menjadi prioritas, karena SDM yang berkualitas unggul akan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi yang optimal. Sejalan dengan hal ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan pegawai, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional kepada pegawai.

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Pada tahun 2025, jumlah pegawai Inspektorat II sebanyak 39 orang dengan rincian 36 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rincian pegawai Inspektorat II berdasarkan jenis ialah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Inspektorat II

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Desember 2025

Ketersediaan sumber daya manusia tersebut secara umum telah menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat II, pembagian tugas telah dilakukan secara proporsional sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pencapaian kinerja.

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Pelaksanaan tugas Inspektorat II didukung oleh Auditor dan pegawai dengan jabatan fungsional lainnya berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/lj/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/lj/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun 2025, terdapat beberapa perubahan golongan dan jabatan pegawai di Inspektorat II, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Jabatan

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Perubahan Jabatan

No	Nama / NIP	Jabatan		Surat Penetapan
		Sebelum	Sesudah	
1	Khalifa Muhammad Haekal, A.Md.Ak / 199907022021011003	Karyasiswa	Auditor Terampil	Keputusan Kepala BKO Nomor 219/KPTS/Sp/PK/2025 Tanggal 28 Mei 2025
2	Yusuf Arya Pratama, S.T. / 199312082018031001	Karyasiswa	Auditor Ahli Pertama	Keputusan Kepala BKO Nomor 385/KPTS/Sp/PH/2025 Tanggal 23 September 2025
3	Firda Wasyiah, S.Tr.Ak./ 199802132019122001	Auditor Terampil	Auditor Ahli Pertama	Keputusan Kepala BKO Nomor 400/KPTS/Sp/PD/2025 Tanggal 29 September 2025
4	Arindya Miftah Ayu Rahma, A.Md.Ak/ 199905082021012003	Auditor Terampil	Karyasiswa	Keputusan Menteri PU Nomor 1053/KPTS/M/2025 Tanggal 24 Oktober 2025
5	Hanni Ananthama Mardhika, S.E./ 198604042025211058	Penata Kepegawaian	Penata Layanan Operasional	Perjanjian Kerja No. KP0204-Is/49
6	Wachyudi/ 198003282025211023	Pramubhakti	Operator Layanan Operasional	Perjanjian Kerja No. KP0204-Is/71
7	Karyo Bin Kadmin/ 198101132025211026	Pengemudi	Operator Layanan Operasional	Perjanjian Kerja No. KP0204-Is/53

b. Kenaikan Pangkat dan Golongan

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Kenaikan Pangkat dan Golongan

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan (Sebelum)	Pangkat / Golongan (Sesudah)	Surat Penetapan
1	Utami Budi Wardani, S.E. / 199012022014022003	Penata / III/c	Penata Tk.I / III/d	Keputusan Kepala BKO Nomor 1596/KPTS/SP/B/2025 Tanggal 8 Juli 2025

Sehingga jumlah pegawai Inspektorat II sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebanyak 39 orang dengan rincian 36 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rincian pegawai berdasarkan golongan dan kelompok jabatan ialah sebagai berikut:

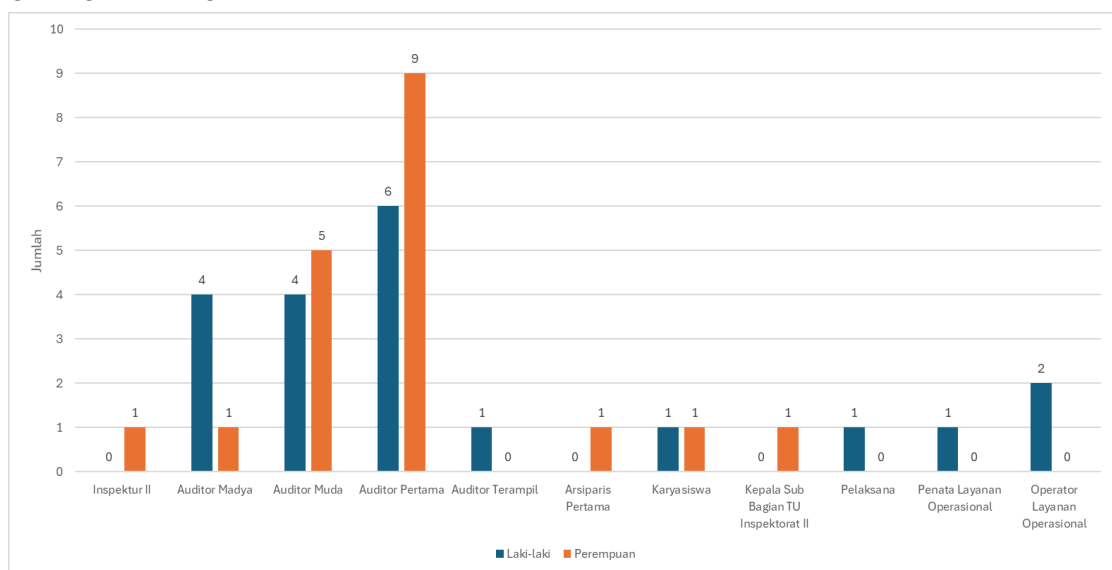
Tabel 1. 4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

Kelompok Jabatan	Golongan						Jumlah
	IV	III	II	I	V	IX	
Inspektorat II	6	27	3	-	2	1	39
a. Inspektur II	1	-	-	-	-	-	1
b. Auditor Madya	5	-	-	-	-	-	5
c. Auditor Muda	-	9	-	-	-	-	9
d. Auditor Pertama	-	15	-	-	-	-	15
e. Auditor Terampil	-	-	1	-	-	-	1

Kelompok Jabatan	Golongan						Jumlah
	IV	III	II	I	V	IX	
f. Arsiparis Ahli Pertama	-	1	-	-	-	-	1
g. Karyasiswa	-	-	2	-	-	-	2
h. Kepala Sub Bagian TU Inspektorat II	-	1	-	-	-	-	1
i. Pelaksana	-	1	-	-	-	-	1
j. Penata Layanan Operasional	-	-	-	-	-	1	1
k. Operator Layanan Operasional	-	-	-	-	2	-	2

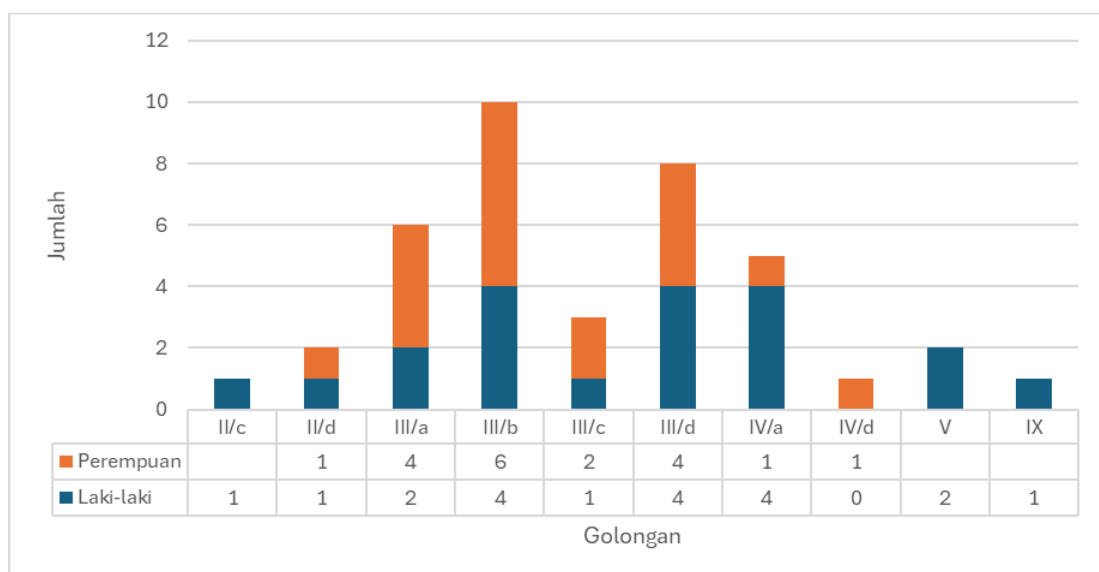
Kelompok Jabatan terbanyak ialah Auditor Ahli Pertama Golongan III sebanyak 15 orang (41,67%) diikuti oleh Auditor Ahli Muda Golongan III sebanyak 9 orang (25%) dan Auditor Ahli Madya Golongan IV sebanyak 5 orang (13,89%).

Jumlah pegawai dengan gender laki-laki sebanyak 20 orang (51,28%) dan gender perempuan sebanyak 19 orang (48,72%) dengan rincian pada kelompok jabatan dan golongan sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Diagram Pegawai berdasarkan Kelompok Jabatan dan Gender

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Desember 2025



Gambar 1. 4 Diagram Pegawai berdasarkan Golongan dan Gender

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Desember 2025

Komposisi pegawai berdasarkan golongan dan kelompok jabatan, khususnya jabatan fungsional auditor dan pelaksana pendukung, merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pengawasan intern. Struktur tersebut secara umum telah menunjang pencapaian kinerja di Inspektorat II.

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, Inspektorat Jenderal melakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Sebagai salah satu hasil dari pengembangan tersebut, pada 2025 jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 5 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Gender

No	Jenjang Pendidikan	2024			2025		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
A	Pegawai Negeri Sipil	15	19	34	17	19	36
1	Magister (S2)	6	9	15	8	9	17
2	Sarjana (S1)	6	8	14	6	7	14
3	Sarjana Diploma IV (DIV)	1	1	2	2	1	3
4	Sarjana Muda (DIII)	2	1	3	1	1	2
B	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3	0	3	3	0	3
1	Sarjana (S1)	1	0	1	1	0	1
2	SLTA	1	0	1	1	0	1
3	SLTP	1	0	1	1	0	1
	Jumlah	18	19	37	20	19	39

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Desember 2025

Pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana Diploma (DIV) bertambah sebesar 33,33% dari semula 2 orang menjadi 3 orang dikarenakan adanya 1 orang pegawai yang telah selesai menempuh pendidikan DIV dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Rekapitulasi Pegawai yang Selesai Menempuh Pendidikan DIV

No	Nama / NIP / Golongan	Program Studi	Universitas
1	Khalifa Muhammad Haekal, A.Md.Ak./ 199907022021011003 / II/c	Akuntansi Sektor Publik	Politeknik Keuangan Negara STAN

Pegawai dengan jenjang pendidikan Magister (S2) bertambah sebesar 11,76% dari semula 15 orang menjadi 17 orang dikarenakan adanya 1 orang tambahan pegawai berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 32/KPTS/Ij/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 18/KPTS/Ij/2025 Tentang Penetapan Pemangku Jabatan, Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Penugasan Pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan 1 orang pegawai yang telah selesai menempuh pendidikan S2 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 7 Rekapitulasi Pegawai yang Selesai Menempuh Pendidikan S2

No	Nama / NIP / Golongan	Program Studi	Universitas
1	Yusuf Arya Pratama, S.T./ 199312082018031001 / III/b	<i>Transport Planning and Engineering</i>	University of Leeds

Selain itu, terdapat 2 orang pegawai yang sedang menjalankan Tugas Belajar jenjang pendidikan Sarjana Diploma (DIV) yaitu:

Tabel 1. 8 Rekapitulasi Pegawai yang Sedang Menjalani Tugas Belajar

No	Nama / NIP / Golongan	Program Studi / Universitas	Jabatan	TMT Jabatan
1	Asrof Vicky Ramdhani, A.Md.Ak. / 200101012021011001 / II/d	Akuntansi Sektor Publik / PKN STAN	Karyasiswa Diploma dan Sarjana	1 Oktober 2024
2	Arindya Miftah Ayu Rahma, A.Md.Ak/ 199905082021012003 / II/d	Akuntansi Sektor Publik / PKN STAN	Karyasiswa Diploma dan Sarjana	1 November 2025

Tidak hanya melalui Tugas Belajar, peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal terutama Inspektorat II juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, yaitu:

Tabel 1. 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Inspektorat II

No	Nama Pelatihan	Pelaksanaan	Nama Pegawai
1	Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	17 s.d 21 Maret 2025	a. Rullyta Sari, S.E. b. Uun Khoiriyah, S.E., M.Ak c. Muhammad Rifqi, S.T. d. Firda Wasyah, S.Tr.Ak. e. Arindya Miftah Ayu Rahma, A.Md.Ak.
2	Evaluasi Tata Kelola TI dan Audit TIK	3 s.d 7 Maret 2025	a. Paini, S.Sos., M.A. b. Achirul Aprisal Annas, S.T., M.MT. c. Dina Septyana, S.T., MPSDA. d. Talitha Puspa Melati, S.T., M.T. e. Silviana Valentin, S.T.
		10 s.d 14 Maret 2025	a. Dian Ekowati Prabuningtyas, S.H. b. Harian Sabta, S.ST. c. Vicky Anggia Ferdina, S.T.
		17 s.d 21 Maret 2025	a. Ricki Fajri Sofyan, S.T., MSCE b. Syarief Fathoni, S.T., M.T. c. Danang Indrapraja, S.E. d. Edi Yasmoro, S.E.
3	Audit Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	10 s.d 14 Maret 2025	a. Frans Pratama, S.T., M.Sc.. b. I Made Parindra Wibawa, S.T., M.Eng. c. Henny Realita Purba, S.T., M.T. d. Dicky Edvant Debrianto, S.T., MSCE
4	Audit Barang Milik Negara (BMN)	3 s.d 7 Maret 2025	a. Yudhistira Adi Nugroho, S.T. b. Khikmatun Nafi'ah, S.E., M.Ak c. Muhammad Hafizh, S.Kom.
5	Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	10 s.d 14 Maret 2025	a. Dimas Bangun Kusuma Muda, S.E., M.T. b. Yesi Agustina, S.E. c. Utami Budi Wardani, S.E. d. Khanifah Wida Aristanti, S.E.
6	E learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	17 Oktober 2025	Ninda Oktriani, S.T.
7	Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025	14 Mei 2025	Silviana Valentin, S.T.

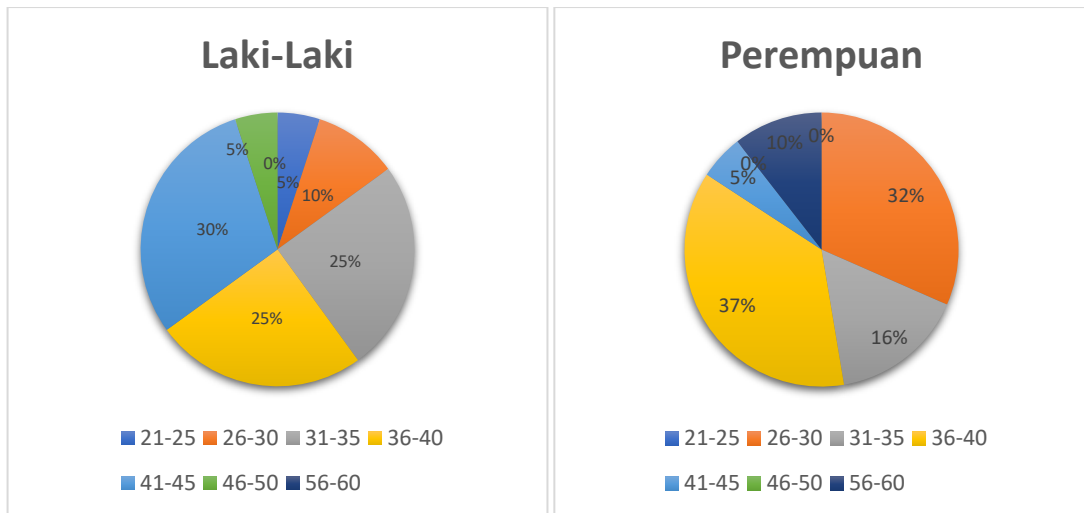
No	Nama Pelatihan	Pelaksanaan	Nama Pegawai
8	Peningkatan <i>Soft Skill</i> dalam Menunjang Pelayanan Prima	17 s.d 21 Maret 2025	a. Nur Aini Utami, S.E., M.Ak. b. Agustina Wulandari, S.Kom. c. Tias Anggoro Mulyo, S.Sos. d. Hanni Ananthama Mardhika, S.E. e. Wachyudi f. Karyo Bin Kadmin
9	Audit Keamanan SPBE Sektor Pemerintahan	10 Juli 2025	a. I Made Parindra Wibawa, S.T., M.Eng. b. Dimas Bangun Kusuma Muda, S.E., M.T. c. Nur Aini Utami, S.E., M.Ak. d. Talitha Puspa Melati, S.T., M.T. e. Vicky Anggia Ferdina, S.T.
10	Fungsional Auditor Ahli Muda	12 November s.d. 4 Desember 2025	Rullyta Sari, S.E.
11	Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan Kementerian PU Tahun 2025	17 s.d 21 Juni 2025	Nur Aini Utami, S.E., M.Ak.
		21 s.d 25 Oktober 2025	Utami Budi Wardani, S.E.
12	Campuran Beraspal Panas sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga Divisi 6 Seksi 6.3	20 s.d 24 Oktober 2025	Ninda Oktriani, S.T.
13	Sosialisasi SE Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 Tahun 2024 Pedoman Penerapan MR di Kementerian PUPR	22 Oktober 2025	Seluruh Pegawai di Inspektorat II
14	Sosialisasi Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia	22 Oktober 2025	Seluruh Auditor di Inspektorat II
15	Sosialisasi Pedoman Telaah Sejawat Ekstern	28 Oktober 2025	Seluruh Pegawai di Inspektorat II
16	<i>Workshop</i> Peningkatan Kompetensi Keprotokolan	23 s.d 24 Oktober 2025	a. Nur Aini Utami, S.E., M.Ak. b. Agustina Wulandari, S.Kom. c. Tias Anggoro Mulyo, S.Sos. d. Hanni Ananthama Mardhika, S.E.

Jumlah pegawai Inspektorat II adalah 39 orang dengan usia paling muda yaitu rentang 21-25 tahun sebanyak 1 orang (2,56%) dan usia paling tua yaitu rentang 56-60 tahun sebanyak 2 orang (5,13%). Rentang usia yang paling banyak ialah 36-40 tahun sebanyak 12 orang (30,77%).

Tabel 1. 10 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
21-25	1	0	1
26-30	2	6	8
31-35	5	3	8
36-40	5	7	12
41-45	6	1	7
46-50	1	0	1
56-60	0	2	2
Total	20	19	39

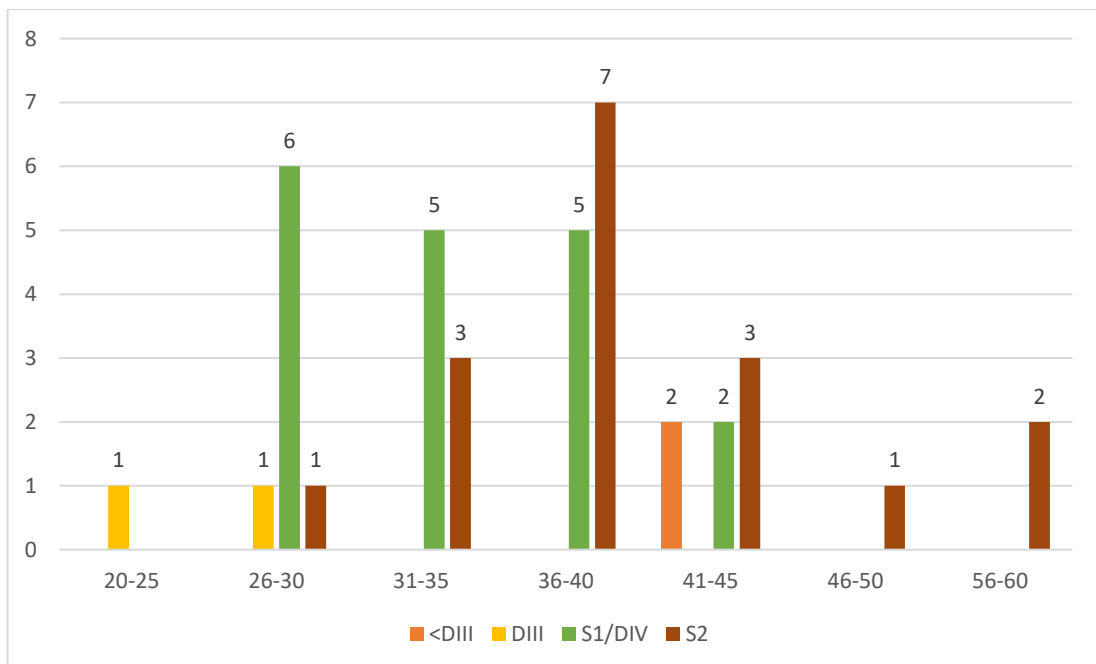
Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Desember 2025



Gambar 1. 5 Diagram Pegawai berdasarkan Usia dan Gender

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Desember 2025

Berdasarkan pendidikan dan usia pegawai di Inspektorat II, jumlah pegawai terbanyak ada pada rentang usia 26-40 tahun dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) dan setingkatnya Sarjana Diploma (DIV) yaitu sebanyak 16 orang (41,03%) serta Magister (S2) sebanyak 11 orang (28,21%). Hal ini menunjukkan Inspektorat II telah didukung oleh pegawai dengan usia produktif dan memiliki latar belakang pendidikan yang lebih dari cukup untuk menjalankan tugas pengawasan pembangunan infrastruktur di Bidang Bina Marga.



Gambar 1. 6 Diagram Pegawai berdasarkan Pendidikan dan Usia

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Inspektorat Jenderal Desember 2025

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan rentang usia berperan dalam mendukung kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan pengawasan intern melalui keseimbangan antara kompetensi teknis dan pengalaman kerja. Komposisi tersebut secara umum telah menunjang pencapaian kinerja Inspektorat II.

1.4 Sarana dan Prasarana

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai mempermudah pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja organisasi Inspektorat II. Barang Milik Negara (BMN) yang tersedia merupakan pembelian tahun-tahun sebelumnya dan terdapat beberapa penambahan pada tahun 2025, antara lain:

Tabel 1. 11 Daftar Barang Milik Negara Inspektorat II Tahun 2025

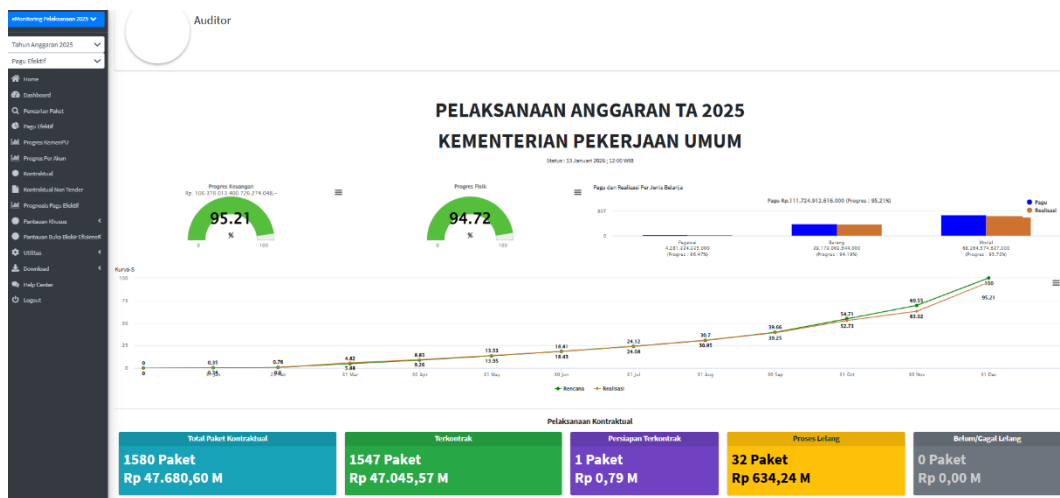
No	Nama Barang	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat		
Barang yang baru ditambahkan pada tahun 2025						
1	Timbangan	1	-	-	1	
2	Cermin	1	-	-	1	
3	Laptop	11	-	-	11	
4	Desktop All in One	1	-	-	1	
Daftar Barang Milik Negara Inspektorat II Tahun 2025						
1	Desktop All in One	8	-	-	8	1 unit pembelian tahun 2025
2	Laptop	40	-	-	40	11 unit pembelian tahun 2025
3	Televisi	6	-	-	6	
4	Printer Berwarna	2	3	-	5	
5	Printer BW	3	-	-	3	
6	Scanner	2	-	-	2	
7	Telepon Fax	1	-	-	1	
8	Lemari Kayu	41	-	-	41	
9	Lemari Pakaian	1	-	-	1	
10	Tempat Tidur	1	-	-	1	
11	Jam Dinding	4	-	-	4	
12	Penghancur Kertas	3	-	-	3	
13	Nakas	3	-	-	3	
14	Meja Kubikal / Workstation	36	-	-	36	
15	Meja Kerja	9	-	-	9	
16	Meja Rapat	8	-	-	8	
17	Meja Tamu	1	-	-	1	
18	Kursi	2	-	-	2	
19	Kursi Kerja	75	1	-	76	
20	Kursi Rapat	26	-	-	26	
21	Meja Kecil	2	-	-	2	
22	Lemari Tempat Dispenser	1	-	-	1	
23	Camera Video Converence	1	-	-	1	
24	Electronic Whiteboard	1	-	-	1	
25	Whiteboard	1	-	-	1	
26	Box Elektrik	1	-	-	1	
27	Sound System	1	-	-	1	
28	Frame Figure	3	-	-	3	
29	Locker (3 x 4)	3	-	-	3	
30	Sofa	9	-	-	9	
31	Air Purrifier	2	-	-	2	
32	Kulkas	2	-	-	2	
33	Digital Air Fryer	1	-	-	1	
34	Coffee Maker	1	-	-	1	
35	Microwave	1	-	-	1	
36	Timbangan	1	-	-	1	1 Unit pembelian tahun 2025
37	Cermin	1	-	-	1	1 Unit pembelian tahun 2025

1.4.2 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai berikut:

a. *ieMonitoring*

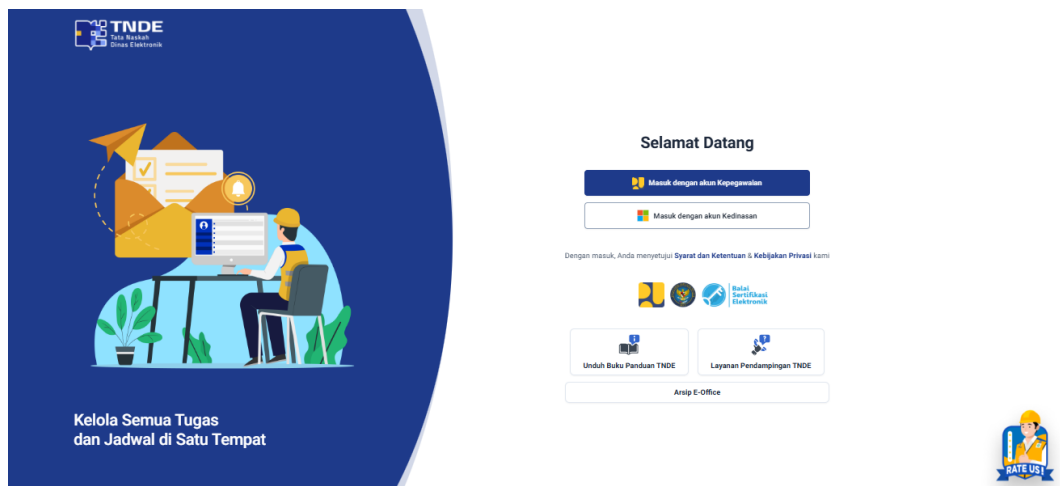
ieMonitoring merupakan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan berbasis elektronik, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data progres pelaksanaan kegiatan yang lengkap, akurat, dan terkini terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sistem informasi ini berisikan data progres pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi berdasarkan data yang diinput Satuan Kerja Kementerian PU. Data dari sistem ini digunakan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan, baik dari Kepala Satuan Kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi maupun dari Pimpinan Unit Organisasi kepada Menteri PU. Selain itu, data tersebut juga digunakan sebagai bahan pelaporan/koordinasi oleh Menteri PU kepada Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. *ieMonitoring* dapat diakses pada alamat <https://iemon.pu.go.id/>.



Gambar 1. 7 Tampilan dan Menu pada Website *ieMonitoring*

b. Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)

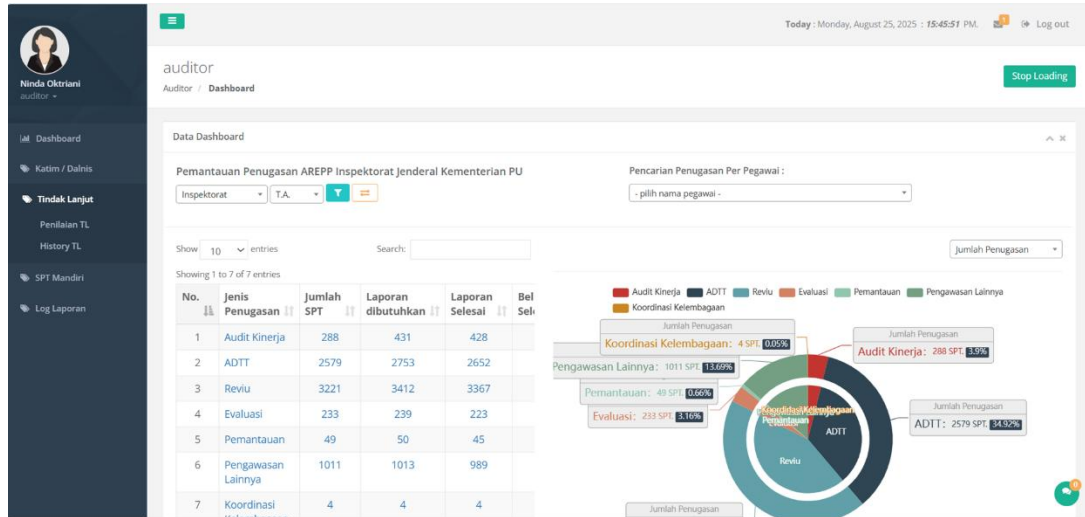
Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun 2025 digunakan TNDE Versi 2 Kolaborasi yang terintegrasi dengan email kedinasan dan e-HRM. TNDE dapat diakses pada alamat <https://eoffice2.pu.go.id/>.



Gambar 1. 8 Tampilan TNDE Versi 2 Kolaborasi

c. e-PTLHP

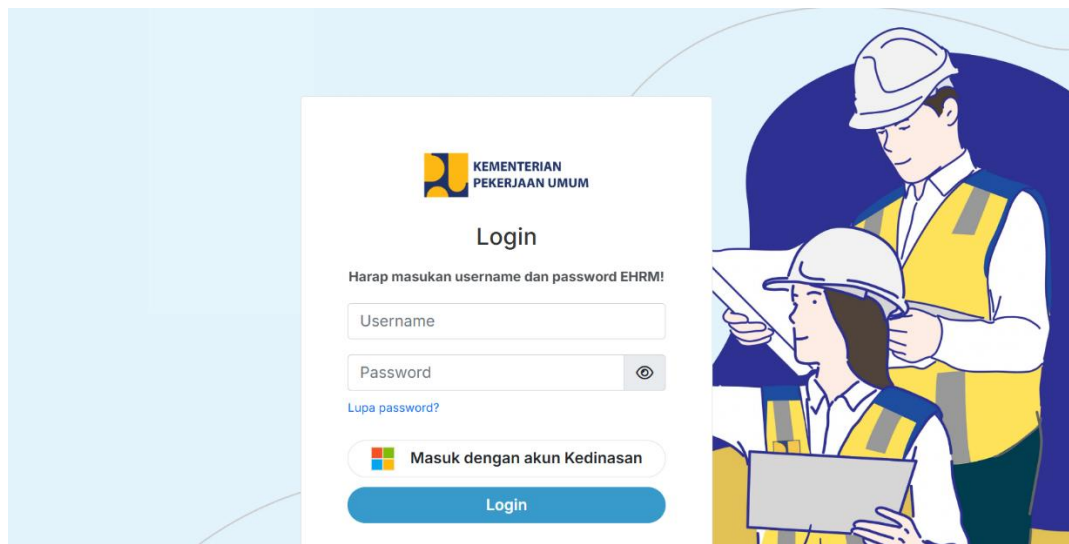
Pada Tahun 2018 telah dilakukan pengembangan sistem informasi yang lebih mutakhir untuk pemantauan penugasan pengawasan intern, laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya yaitu e-PTLHP yang diakses pada alamat <https://eptlhp.pu.go.id/>.



Gambar 1. 9 Tampilan dan Menu pada Website e-PTLHP

d. e-HRM

e-HRM (*Electronic Human Resource Management*) merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian data kepegawaian Kementerian Pekerjaan Umum. e-HRM saat ini menjadi data utama dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap Manajemen PNS. Sistem e-HRM dapat diakses pada <https://ehrm.pu.go.id/>.

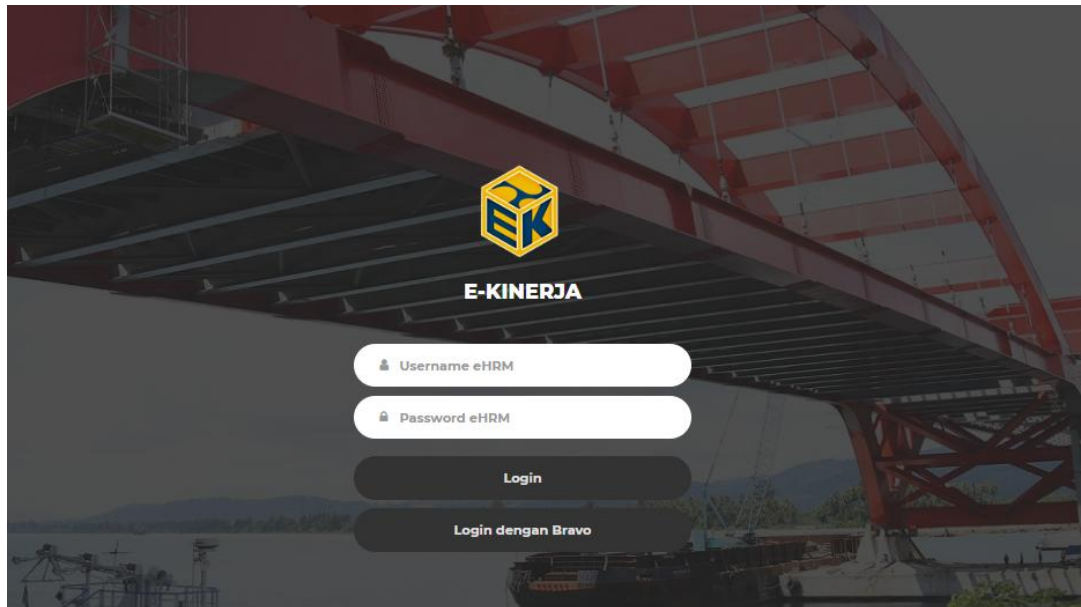


Gambar 1. 10 Tampilan Awal Website e-HRM

e. e-Kinerja

e-Kinerja merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kementerian Pekerjaan Umum dan

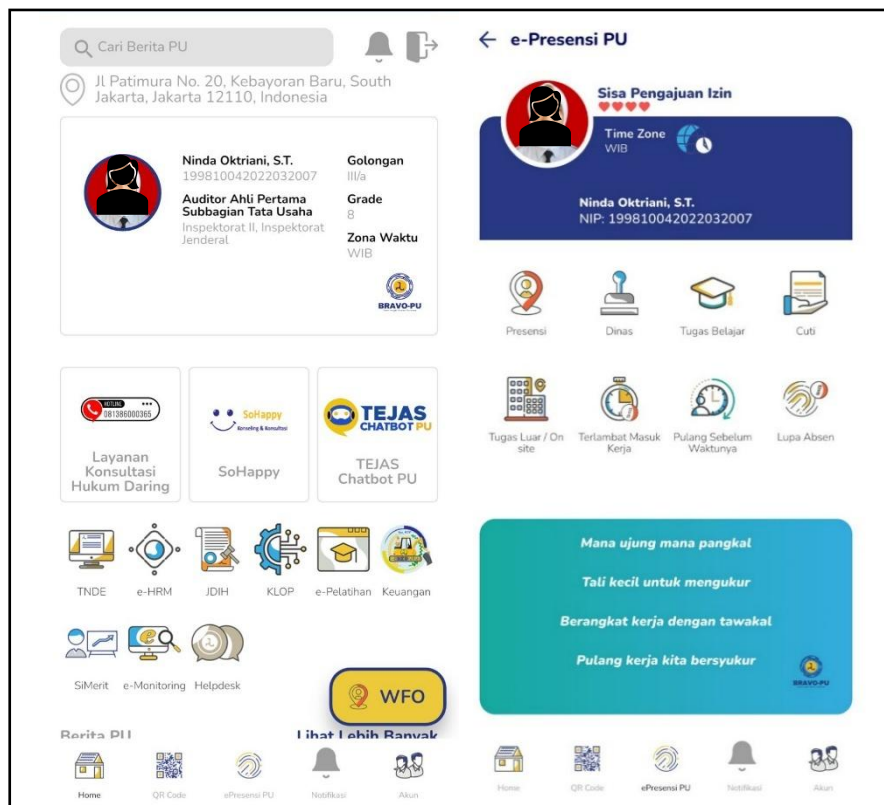
penilaiannya, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem e-Kinerja dapat diakses pada <https://kinerja.pu.go.id/>.



Gambar 1. 11 Tampilan Awal Website e-Kinerja

f. Satu Bravo

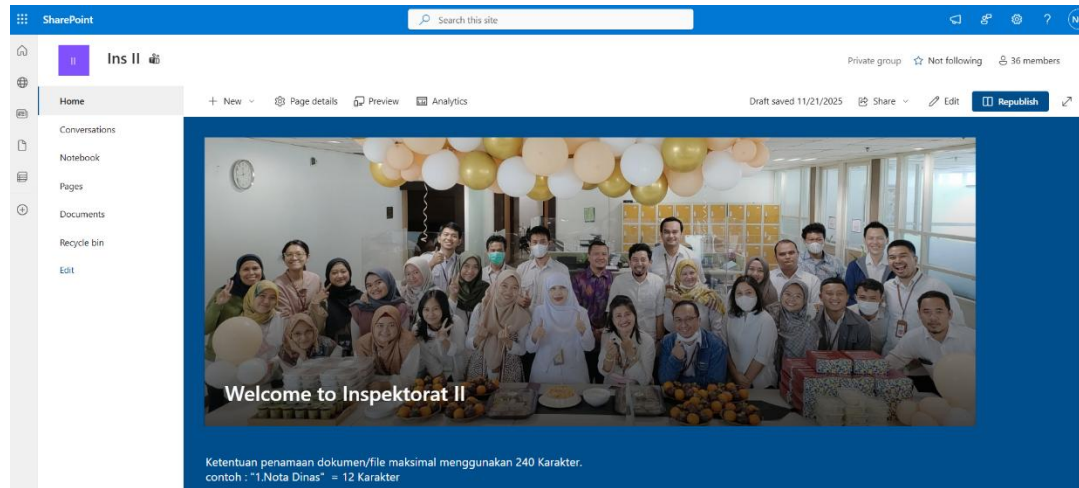
Satu Bravo merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan untuk mengorganisir data dan informasi kepegawaian, kinerja dan anggaran, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem informasi ini dapat diakses melalui aplikasi Satu Bravo.



Gambar 1. 12 Tampilan Aplikasi Satu Bravo

g. Microsoft 365

Pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan layanan Microsoft 365 untuk sarana *working collaboration*. Layanan Microsoft 365 mencakup aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan OneDrive. Selain itu, fitur kolaborasi seperti Microsoft Teams mempermudah komunikasi antar pegawai, baik melalui pesan instan, video conference, maupun integrasi dengan dokumen kerja. Pemanfaatan Microsoft 365 di Inspektorat II terutama pada fitur layanan cloud OneDrive memudahkan akses file data dan informasi penunjang pekerjaan.



Gambar 1. 13 Tampilan Site Microsoft 365

1.5 Isu Strategis

Isu strategis terkait pengawasan di Inspektorat II, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah Auditor di Inspektorat II yaitu 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 5 (lima) Auditor Madya, 9 (sembilan) Auditor Muda, 15 (lima belas) Auditor Pertama, dan 1 (satu) Auditor Terampil. Berdasarkan analisa beban kerja, kompetensi dan SDM Inspektorat II masih belum sesuai dengan kebutuhan Auditor untuk mengawasi 226 (dua ratus dua puluh enam) satuan kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki alokasi anggaran Rp37,3 Triliun.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan berdasarkan hasil perhitungan analisa beban kerja diketahui bahwa Formasi Jabatan Fungsional Auditor untuk Inspektorat II Kementerian PU seharusnya terdiri dari 45 orang Auditor Ahli Pertama/Auditor Terampil, 15 Auditor Ahli Muda, 5 Auditor Ahli Madya dan ditambah 2 Auditor Ahli Utama.

Berdasarkan analisa beban kerja tersebut terdapat selisih kebutuhan auditor di Inspektorat II dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 12 Perbandingan Kebutuhan dan Realisasi Auditor Inspektorat II

No.	Jenjang	Kebutuhan	Realisasi	Selisih
1.	Auditor Utama	2 orang	-	2 orang
2.	Auditor Madya	5 orang	5 orang	-
3.	Auditor Muda	15 orang	9 orang	6 orang

No.	Jenjang	Kebutuhan	Realisasi	Selisih
4.	Auditor Pertama/Terampil	45 orang	16 orang	29 orang
	Total	67 orang	30 orang	37 orang

Terhadap kurangnya SDM Auditor untuk kegiatan pengawasan, Inspektorat II memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses pengawasan sehingga dapat mengurangi beban kerja auditor.

- b. Hasil kegiatan pengawasan berupa Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan tata kelola dan pengambilan keputusan strategis oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Terhadap hal tersebut, Inspektorat II melakukan komunikasi efektif untuk memastikan hasil pengawasan yang telah diterima oleh Direktur Jenderal Bina Marga dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengembangan sistem informasi (ePTLHP) juga dilakukan untuk memfasilitasi penggunaan hasil pengawasan untuk perbaikan tata kelola dan pengambilan keputusan strategis.
- c. Banyaknya kegiatan pengawasan yang jumlahnya melebihi Program Pengawasan yang telah ditetapkan antara lain ADTT Usulan Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam, ADTT Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK RI, Reviu Penelitian Administrasi Kontrak Tahun Jamak, Reviu Perpanjangan Izin Kontrak Tahun Jamak, Reviu Revisi Anggaran, dan Penilaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal.

Tabel 1. 13 Rekapitulasi Progres Pengawasan Intern Inspektorat II pada Direktorat Jenderal Bina Marga TA 2025

No.	Kegiatan	Volume		
		Target	Realisasi (Laporan)	Realisasi (%)
1.	Pelaksanaan Audit di Inspektorat II	40	127	317,5%
2.	Pelaksanaan Reviu di Inspektorat II	28	253	903,57%
3.	Pelaksanaan Evaluasi di Inspektorat II	10	12	120,00%
4.	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	9	8	88,89%
5.	Pelaksanaan Pemantauan di Inspektorat II	54	136	251,85%
TOTAL		141	536	380,14%

Terhadap hal tersebut, Inspektorat II menentukan prioritas kegiatan pengawasan berdasarkan kebutuhan dan risiko yang ada serta mengatur jadwal kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi penjelasan umum organisasi, meliputi tugas fungsi organisasi dan struktur organisasi, serta isu strategis yang dihadapi selama tahun 2025.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum, tujuan Inspektorat Jenderal, arah kebijakan dan strategi, sasaran strategis, perjanjian kinerja serta perubahannya, metode pengukuran IKK, target rencana, serta peta kinerja Inspektorat Jenderal.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Inspektorat II 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, analisa perbandingan kinerja, analisa realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja yang meliputi: Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bukti Dukung Capaian Kinerja, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Berita Acara Pembahasan & Kesepakatan Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Tahun 2025, dan Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Infrastruktur Pekerjaan Umum.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 yaitu

“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional;
3. Meningkatkan akses infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional;
5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
6. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel; dan
7. Meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian PU, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

“Meningkatnya kualitas Pengawasan dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Penetapan Tujuan ini menjadi acuan Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai APIP dalam rangka mendukung pencapaian 7 (tujuh) tujuan pembangunan jangka menengah Kementerian PU sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air nasional;
2. Memperkuatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan;
3. Memperkuatnya akses infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian, Peribadatan, Pendidikan, Olahraga, Sosial Budaya dan Kesehatan secara nasional yang andal dan berkualitas;

5. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi;
6. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya; dan
7. Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Pada periode 2025-2029, arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal disusun dengan mempertimbangkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan untuk memastikan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Jenderal.

- a. Arah prioritas dan strategi pembangunan nasional, penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden.

Kementerian PU merupakan instansi dalam pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada lingkup strategis dapat menyebabkan perubahan arah prioritas dan strategi pembangunan nasional yang dapat mempengaruhi prioritas pembangunan dan/atau menyebabkan penugasan baru dan/atau penugasan tambahan, tugas direktif dari Presiden dalam bidang pekerjaan umum. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU harus selaras dan adaptif terhadap dengan hal tersebut.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini adalah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan mempertimbangan isu strategis terkini serta berkoordinasi dengan APIP lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam pelaksanaannya, PKPT harus dapat bersifat adaptif terhadap perubahan prioritas dan lingkungan strategis agar APIP dapat terus memberi nilai tambah bagi pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur.

- b. Pelaksanaan Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Organisasi.

Inspektorat Jenderal selaku APIP telah melakukan upaya peningkatan kapabilitas sejak Tahun 2015, melalui serangkaian upaya untuk memenuhi gap kapabilitas dari Level 2 IACM (Hasil *Quality Assurance* oleh BPKP Tahun 2011 dan 2017), Level 3 Dengan Catatan pada Tahun 2019, Level 3 dengan skor 3,53 pada Tahun 2022, hingga mencapai Level 4 dengan skor 4,06 pada tahun 2023 dan 2024. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal berada pada Level 4 (skor 4,06).

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP, khususnya elemen Peran dan Layanan, kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi ini adalah:

- 1) Menyusun PKPT dengan memprogramkan pengawasan terhadap program strategis lintas sektoral secara konsisten dan berkelanjutan;
- 2) Memberikan dan memantau tindak lanjut rekomendasi strategis yang fokus terhadap perbaikan 3E dalam rangka perbaikan GRC secara keseluruhan sekaligus menjadi *early warning system* sehingga hasil pengawasan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- 3) Memberi layanan konsultasi sehingga dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis (*strategic partner*) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan dan *trusted advisor* bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

- c. Optimalisasi tata kelola hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense* dalam Sistem Pengendalian Intern.

Tantangan dalam model 3 Lini Pengawasan Internal adalah pola koordinasi dan komunikasi yang efektif antara tiga lini pengawasan dalam melaksanakan pengawasan. Belum adanya kebijakan yang mengatur pola koordinasi dan komunikasi antara masing-masing lini menyebabkan terjadi tumpang tindih peran atau bahkan kekosongan peran, miskomunikasi, dan kesenjangan informasi antara masing-masing lini. Hal ini dapat menghambat integrasi pengawasan dan menurunkan efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang sistematis, pemahaman peran yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk memastikan sinergi di antara ketiga lini tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel dan transparan.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Menyusun pedoman yang mengatur tata hubungan kerja antara Kepatuhan Intern Unit Organisasi selaku *second line of defense* dan APIP selaku *third line of defense*. Perlu dibangun pola koordinasi dan komunikasi yang efektif, kolaborasi yang sinergis, dan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing dalam sistem pengendalian intern. Peran dan wewenang masing-masing lini perlu diuraikan dengan jelas dan memadai agar pengawasan internal dapat berjalan dengan efektif terhadap seluruh unsur tanpa terjadi tumpang tindih dan/atau kekosongan pengawasan. Dengan demikian akan terbangun tata kelola hubungan kerja yang kuat dan sinergis yang akan meningkatkan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko di Kementerian PU;
 - 2) Berkoordinasi dengan Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah selaku koordinator penyusun Rencana Strategis Kementerian PU terkait usulan penyeragaman indikator kinerja Unit Kepatuhan Intern.
- d. Optimalisasi budaya sadar risiko dan integrasi pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tata kelola dalam rangka peningkatan Sistem Pengendalian Intern. Hasil evaluasi BPKP tahun 2024 menunjukkan bahwa Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kementerian Pekerjaan Umum telah mencapai Level 4, menandakan implementasi kebijakan pengelolaan risiko yang cukup matang meskipun belum sepenuhnya optimal. Pengendalian risiko telah mendukung pencapaian tujuan organisasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam mengidentifikasi serta mengoptimalkan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat *transfer knowledge* dan kesadaran dalam penerapan manajemen risiko, serta pemanfaatan hasil penilaian risiko korupsi yang belum sepenuhnya berdampak nyata. Perbaikan tata kelola manajemen risiko perlu terus dilakukan, dengan menekankan integrasi manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi serta optimalisasi budaya sadar risiko untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern.
- Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:
- 1) Mendorong pelaksanaan sosialisasi penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern pada seluruh unit organisasi sampai dengan unit kerja terkecil;
 - 2) Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, memberikan rekomendasi terhadap perbaikan pelaksanaan manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut;

- 3) Melakukan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat, memberikan *area of improvement* pelaksanaan SPIP, serta memantau tindak lanjut terhadap *area of improvement* tersebut.
- e. Optimalisasi pengelolaan SDM bidang pengawasan dalam segi pemenuhan formasi dan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan serta tugas dan fungsi masing-masing pegawai.
Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Kementerian Pekerjaan Umum masih belum memenuhi formasi yang ditetapkan, sehingga kapasitas pengawasan belum optimal. Selain itu, kompetensi pegawai JFA juga belum sepenuhnya memenuhi standar yang telah ditetapkan, yang dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.
Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah optimalisasi pengelolaan SDM di bidang pengawasan, baik dalam pemenuhan formasi maupun pengembangan kompetensi yang sesuai dengan standar jabatan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan secara menyeluruh serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai JFA di lingkungan Kementerian PU.
- f. Pengembangan teknologi informasi pemantauan dan pengawasan berkelanjutan atau *Continuous Audit–Continuous Monitoring* beserta keamanan data digital. *Continuous Audit–Continuous Monitoring* (CACM) merupakan wujud nyata implementasi Teknologi Informasi dalam pengawasan intern sebagai bagian dari SPBE Kementerian PU yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan intern. *Continuous Auditing* adalah pendekatan audit dengan otomasi dan teknologi informasi untuk terus-menerus mengevaluasi data, *Continuous Monitoring* adalah strategi pemantauan yang melibatkan penggunaan alat otomatis untuk memberikan visibilitas data terkini terhadap kinerja, kepatuhan, dan risiko dalam suatu organisasi.
Penggunaan CACM dapat mendukung pengaksesan data yang valid dan analisis secara realtime sehingga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengawasan, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mendukung pengambilan keputusan oleh Pimpinan. Akan tetapi, penggunaan CACM juga dapat menimbulkan risiko lain berupa serangan siber yang harus dimitigasi, diantaranya berupa kebocoran data, pengaksesan data secara ilegal, kerentanan sistem dan perangkat lunak, dan lain sebagainya. Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:
- 1) Mengembangkan CACM sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan proses bisnis pengawasan Inspektorat Jenderal;
 - 2) Melaksanakan tata Kelola SPBE Inspektorat Jenderal;
 - 3) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang risiko serangan siber.
- g. Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum.
Rendahnya persepsi masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Kementerian PU tercermin dari banyaknya pengaduan terkait proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya penguatan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan PBJ.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam menghadapi kondisi tersebut adalah:

- 1) Penyusunan produk hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat yang bersifat menyeluruh untuk Kementerian PU sebagai bagian dari perbaikan produk hukum yang sudah ada;
 - 2) Penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan dalam hal pengaduan terbukti;
 - 4) Penguatan program pemberantasan korupsi seperti pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pengendalian gratifikasi, implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, dan lain sebagainya;
 - 5) Keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kepercayaan publik.
- h. Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan

Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pengawasan merupakan langkah strategis dalam pengawasan dan pengawalan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah dan menindaklanjuti potensi tindakan fraud. Dengan memperkuat koordinasi, berbagi informasi, serta melakukan asistensi dan pendampingan hukum, diharapkan risiko penyimpangan dapat diminimalisir sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sinergi dan kolaborasi dilakukan melalui koordinasi yang berkelanjutan antara APIP (Inspektorat Jenderal dan BPKP), lembaga pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK, serta aparat penegak hukum. Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan teknologi informasi bersama dan pengembangan sistem pelaporan yang saling terintegrasi guna meminimalkan duplikasi pengawasan.

Kegiatan koordinasi dengan mitra instansi eksternal Kementerian PU antara lain dengan melaksanakan kerja sama pengawasan dan pengamanan penyelenggaraan Infrastruktur Kementerian PU dengan pihak BPKP dan APH, pelaksanaan tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan oleh KPK, koordinasi penanganan pengaduan baik dengan APH maupun lembaga lain seperti Badan Ombudsman dan KPPU, dan pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan APIP lain, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, LKPP, KPPU dan PPATK.

Kebijakan Inspektorat Jenderal dalam mengoptimalkan koordinasi antara lain dengan menyusun, merevisi, dan/atau memperbaiki kerja sama dengan pihak terkait di bidang pengawasan serta melakukan identifikasi risiko kemitraan terhadap pencapaian sasaran program ataupun sasaran kegiatan.

Untuk mendukung kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal, Inspektorat II menjalankan peran sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan AREPP dengan menerapkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dan mempertimbangan isu strategis terkini di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- b. Mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola organisasi, penerapan manajemen risiko, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- c. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- d. Melakukan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PU Nomor 4 Tahun 2025, dirumuskan 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS) Kementerian PU sebagai berikut:

- SS-01 Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
- SS-02 Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan
- SS-03 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan
- SS-04 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian PU
- SS-05 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
- SS-06 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya**
- SS-07 Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan

Inspektorat Jenderal selaku salah satu unit organisasi di Kementerian PU berkontribusi secara langsung pada SS-06 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya yang dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dan Indikator Kinerja Sasaran Program yaitu:

- a. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen); dan
- b. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PU.

Program tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) unit kerja di Inspektorat Jenderal bersama dengan sasaran kegiatan (SK) dan indikator sasaran kinerja kegiatan (IKSK) sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Peta Strategi Inspektorat Jenderal

Sumber :Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029

Seperti dijabarkan dalam Gambar 2.1 Peta Strategi Inspektorat Jenderal di atas, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (*customers*) agar dapat terpenuhi dan untuk memenuhi harapan *stakeholders*, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam internal process dan *learning and growth* dalam bentuk Sasaran Kegiatan sebagai (SK) berikut:

SK 2.1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I;

SK 2.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II;

SK 2.3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III;

SK 2.4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV;

SK 2.5 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V;

SK 2.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Wilayah Pengawasan Inspektorat VI.

Inspektorat II bertanggungjawab atas pemenuhan SK 2.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada bulan Januari 2025, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Inspektur II dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029 dan DIPA Awal Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Pada Perjanjian Kinerja ini, Inspektur II berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2025 (PK Awal)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	79,00%

Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp2.065.746.000

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tanggal 31 Januari 2025

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Pada Perjanjian Kinerja ini, Inspektur II berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan perubahan berupa perubahan target, penambahan anggaran, dan penambahan Manual Indikator Kinerja.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2025 (PK Revisi Akhir)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	76,61%

Keterangan:

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum di Inspektorat II dengan Anggaran sebesar Rp2.116.198.000

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tanggal 29 Desember 2025

2.2.3 Kronologi Perubahan PK

Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat II Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan target pada Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029 dan anggaran pada DIPA Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2025 perubahan PK dilakukan sebanyak 3 kali dengan kronologis sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Revisi ke-1 Tanggal 4 Juli 2025

Revisi dilakukan karena adanya pergantian Inspektur Jenderal yang semula Bapak Dadang Rukmana menjadi Ibu Maulidya Indah Junica.

Semula

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh, S.T., M.T.
Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Pertama: *nikmatulloh*
NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Pihak Kedua: *Dadang Rukmana*
DADANG RUKMANA

Menjadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh, S.T., M.T.
Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Juli 2025

Pihak Pertama: *nikmatulloh*
NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Pihak Kedua: *Dr. Ir. Maulidya Indah Junica*
Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Gambar 2. 2 Perubahan PK Revisi ke-1

- Perjanjian Kinerja Revisi ke-2 Tanggal 30 September 2025
Revisi dilakukan perubahan target dan anggaran karena adanya penambahan 2 sub indikator kinerja yaitu Transformasi Digital dan Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan serta penambahan alokasi anggaran berdasarkan Revisi ke-8 DIPA Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal Tanggal 26 September 2025.

Semula

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	79,00%

Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran
Rp 2.065.746.000

INSPEKTUR JENDERAL
Jmmmf
DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025
INSPEKTUR II
nik
NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Menjadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	76,61%

Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran
Rp 2.116.198.000

INSPEKTUR JENDERAL
Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.
Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Jakarta, 30 September 2025
INSPEKTUR II
nik
NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Gambar 2. 3 Perubahan PK Revisi ke-2

- Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tanggal 29 Desember 2025
Revisi dilakukan karena adanya penambahan Manual Indikator Kinerja berupa metode perhitungan indikator kinerja.

Semula

Tidak terdapat manual indikator kinerja

Menjadi

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT II
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	76,61%	Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat II dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut: 1. Dua Puluh Persen (20%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat II dan Nilai Telaah Sejawat Internal Antar Inspektorat; 2. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dari Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal; 3. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II dari Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan; 4. Lima Belas Persen (15%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; 5. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat II yang dihitung melalui Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang disusun tepat waktu; 6. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat II.
			7. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II; 8. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat II yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat II (Sub IKK Baru); 9. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Inspektorat II (Sub IKK Baru);

INSPEKTUR JENDERAL
MAULIDYA INDAFI JUNICA

Jakarta, 23 Desember 2025
INSPEKTUR II
NIKMATULLOH

Gambar 2. 4 Perubahan PK Revisi Akhir

2.3 Metode Pengukuran

Metode pengukuran capaian kinerja adalah pemantauan dan perhitungan terhadap realisasi atau capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai indikator kinerja utama pada Inspektorat II, lalu membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi. Sumber data IKK dapat berasal dari pengakuan eksternal, hasil penilaian internal, data hasil pemantauan dan *database* Sistem Informasi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut. Penjelasan metode pengukuran capaian kinerja Inspektorat II sebagai berikut:

1. **Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II**, Nilai Hasil Telaah Sejawat Antar Inspektorat (Bobot 20,00%)
2. **Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II**, Persentase perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan (Bobot 20,00%):
 - 1) Pengawasan Terjadwal: 50,00%
 - 2) Pengawasan Tidak Terjadwal: 50,00%
3. **Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II**, Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan, dengan bobot sesuai tahapan pengaduan (Bobot 20,00%):
 - 1) SPT : 25,00%
 - 2) Konsep LHADTT: 50,00%

- 3) LHADTT dan SP: 100%
4. **Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II**, jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang telah ditindaklanjuti, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi, dengan perbandingan (Bobot 15,00%):
- 1) Itjen : 50,00% (Belum Tuntas: 0,00%, Tuntas: 100,00%)
 - 2) BPKP : 25,00% (Belum Tuntas: 0,00%, Tuntas: 100,00%)
 - 3) BPK : 25,00% (Belum Tuntas: 0,00%, Memadai sesuai Hasil Verifikasi Itjen: 75,00%, Tuntas pada SIPTL: 100,00%)
5. **Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat II**, Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang disusun tepat waktu (Bobot 5,00%).
6. **Nilai SAKIP Inspektorat II**, Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat II (Bobot 5,00%).
7. **Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 Inspektorat II**, Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II (Bobot 5,00%).
8. **Transformasi Digital Inspektorat II**, Nilai Transformasi Digital Inspektorat II (Bobot 5,00%).
9. **Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II**, Nilai Audit Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II (Bobot 5,00%).

2.4 Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Rencana Strategis

Sasaran Kegiatan (SK) 2.2: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

SK 2.2 adalah sasaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum di Inspektorat II, dengan **IKK Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II**.

IKK pada SK 2.2 diukur berdasarkan persentase tertentu dari 9 (sembilan) sub indikator sebagaimana dalam tabel 2.5.

Tabel 2. 3 Cara Pengukuran Sasaran Kegiatan 1.2

SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / CARA PENGUKURAN	TARGET 2025
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	76,61%
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II (20%)	94,5
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II (20%)	85%
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II (20%)	85%
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II (15%)	75,5%
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT (5%)	100%
	6. Nilai SAKIP Inspektorat II (5%)	A (Nilai 80,7)
	7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Inspektorat II (5%)	4 (Nilai 77)
	8. Transformasi Digital Inspektorat II (5%)	30
9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II (5%)	40	

2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Sesuai Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern melalui Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program yaitu **Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya** yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) berikut:

1. IKSP 1: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen);
2. IKSP 2: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum.

Inspektorat II bertanggungjawab atas pemenuhan Sasaran Kegiatan 2.2 “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II”.

Realisasi kinerja Inspektorat II selama tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Realisasi Kinerja Inspektorat II tahun 2025-2029

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 2.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II						
IKK 2.2 Tingkat Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Target (%)	76,61	78,86	81,11	83,36	85,63
	Realisasi (%)	86,82	-	-	-	-
	Capaian (%)	113,3	-	-	-	-

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan IKK 2.2 Tingkat Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II telah memenuhi target yang ditetapkan pada Renstra Tahun 2025.

2.4.2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025-2029, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis ke-6 (SS-06) Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Tujuan dan Sasaran Strategis ke-6 (SS-06) Kementerian PU

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
6	Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya						
	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya.	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur (%)	79,15	81,78	84,41	87,10	89,90

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tanggal 9 Desember 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program yaitu Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Adapun Indikator Kinerja Program tersebut adalah:

- a. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen);
- b. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum.

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					TOTAL
			2025	2026	2027	2028	2029	
INSPEKTORAT JENDERAL								
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya								
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur	%	79,15	81,78	84,41	87,10	89,90	89,90
PROGRAM: Dukungan Manajemen								
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM:							
1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Itjen)	%	80,57	81,70	83,12	84,31	90,15	90,15
2	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Pekerjaan Umum	%	79,15	81,78	84,41	87,10	89,90	89,90

Sumber : Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029

Program Dukungan Manajemen di Inspektorat Jenderal dijabarkan ke dalam 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 Unit Kerja Tingkat Eselon II Inspektorat Jenderal, namun yang dilaksanakan oleh Inspektorat II ialah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dengan indikator Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II.

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II 2025-2029

	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
Program	Dukungan Manajemen							
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
Kegiatan 2	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU							
SK 2.2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II							
IKK 2.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	76,61	78,86	81,11	83,36	85,63	85,63
	1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	Nilai	94,50	94,60	94,70	94,80	95,00	95,00

	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	Total
	2. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	3. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II	%	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00	93,00
	4. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II	%	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	77,50
	5. Tingkat Perencanaan UPKPT	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6. Nilai SAKIP Inspektorat II	Kategori	A (Nilai 80,70)	A (Nilai 80,80)	A (Nilai 80,90)	A (Nilai 81,00)	A (Nilai 81,10)	A (Nilai 81,10)
	7. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 Inspektorat II	Level	4 (Nilai 77)	4 (Nilai 78)	4 (Nilai 79)	4 (Nilai 80)	4 (Nilai 81)	4 (Nilai 81)
	8. Transformasi Digital Inspektorat II	Nilai	30	35	40	45	50	50
	9. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	40	45	50	55	60	60

Sumber : Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 – 2029



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat II yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II” diukur dari capaian IKK 2.2.

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi AKIP Inspektorat II Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan melalui Surat Inspektur V Nomor PW 0204-Ie/32 Tanggal 11 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 pada Inspektorat II, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi atas AKIP Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun Anggaran 2024 dikategorikan A (Memuaskan) dengan nilai 80,80.

Selain itu, masih terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator untuk dapat meningkatkan implementasi AKIP Inspektorat II. Terhadap catatan dan rekomendasi tersebut, Inspektorat II telah melakukan upaya diantaranya sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat II Tahun 2024

No	Komponen	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan
1	Perencanaan Kinerja	Laporan Monev Bulanan agar menyajikan Rencana Aksi Bulanan yang tercantum dalam Rencana Aksi Kinerja (B0) dan/atau revisi Rencana Aksi Kinerja (B0)	Rencana aksi bulanan pada Laporan Monev Bulanan di tahun 2025 telah sesuai dengan Rencana Aksi Kinerja (B0) dan/atau revisi Rencana Aksi Kinerja (B0).
2	Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Data kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan; b. Data kinerja yang dikumpulkan agar mendukung capaian kinerja yang diharapkan; c. Laporan Monev Bulanan agar menyajikan rencana, permasalahan, dan Tindak Lanjut dalam rangka capaian kinerja di PK. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Telah dilakukan Pemeriksaan berjenjang untuk meminimalisir kesalahan penyajian data; b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Pencatatan output kegiatan telah didukung oleh data upload laporan dari aplikasi ePTLHP; c. Laporan Monev Bulanan telah menyajikan rencana, permasalahan, dan Tindak Lanjut dalam rangka capaian kinerja di PK pada Subbab 3.1 Permasalahan dan Strategi Penyelesaian.
3	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Monev Bulanan agar disusun secara berkala; b. Dalam penyusunan Laporan Kinerja agar direviu secara berjenjang; c. Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu; d. Inspektorat II agar melakukan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Monev Bulanan telah disusun secara berkala setiap bulannya; b. Penyusunan Laporan Kinerja TA 2025 telah direviu secara berjenjang dengan menggunakan lembar kendali reviu berjenjang; c. Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu; d. Telah dilakukan analisis terhadap capaian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja TA 2025 pada Subbab 3.2.1.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Inspektorat II agar memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Rekomendasi yang disampaikan dalam hasil Evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti, diharapkan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut maka hasil Evaluasi AKIP telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.2 Capaian Kinerja

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Kegiatan 2.2 “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II” adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan 1.2

SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR		SATUAN	TARGET	REALISASI	%
SASARAN KEGIATAN 2.2: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II					
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		%	76,61	87,85	114,67
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	Nilai	94,50	93,13	98,55
2	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II	%	85	100	117,65
3	Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II	%	85	100	117,65
4	Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II	%	75,5	84,36	111,74
5	Tingkat Perencanaan UPKPT	%	100	100	100,00
6	Nilai SAKIP Inspektorat II	Kategori	A (Nilai 80,70)	A (Nilai 80,80)	100,12
7	Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 Inspektorat II	Level	4 (Nilai 77)	4 (Nilai 88,64)	115,17
8	Transformasi Digital Inspektorat II	Nilai	30	86,54	288,48
9	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	40	55,48	138,70

Secara umum, realisasi Sasaran Kegiatan 2.2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II telah melebihi target tahun 2025 yaitu sebesar 114,67% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II diperoleh dari kegiatan Evaluasi Telaah Sejawat Internal oleh Inspektorat III, Inspektorat Jenderal.. Berdasarkan hasil *Quality Assurance* yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor PW0204/R/Ij/2026/1 Tanggal 15 Januari 2026 nilai hasil TSI Inspektorat II menjadi 93,13. Nilai tersebut berada pada rentang 90-100 yang dikategorikan Sangat Baik namun belum mencapai target tahun 2025 (94,5) karena terdapat beberapa catatan dari evaluator, antara lain:
 - 1) Terdapat Auditor di Inspektorat II yang belum mengikuti pelatihan/workshop/ seminar/PKS/kegiatan sejenis terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI);
 - 2) Inspektorat II belum melakukan audit tata kelola TI organisasi di Tahun Anggaran 2025;
 - 3) Laporan hasil audit belum diselesaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman/peraturan yang berlaku di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
 - 4) Rekomendasi pada laporan hasil audit belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Auditi.
- b. Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II didapatkan dari persentase pelaksanaan PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan:
 - 1) Pengawasan Terjadwal : 50%
 - 2) Pengawasan Tidak Terjadwal: 50%

Realisasi pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II adalah sebesar 100%. Hal ini telah melebihi target tahun 2025 yang telah direncanakan (85%). Komposisi pengawasan terjadwal dan pengawasan tidak terjadwal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II

Pengawasan Terjadwal (50%)			Pengawasan Tidak Terjadwal (50%)			Realisasi kegiatan (laporan)	Tingkat Pelaksanaan Pengawasan (%)
Target (laporan)	Realisasi (laporan)	% (a)	Target (laporan)	Realisasi (laporan)	% (b)		
43	44	100*	98	499	100**	543	100***

* Persentase pelaksanaan pengawasan terjadwal telah mencapai 102,33%, namun dengan memperhatikan batasan capaian, maka realisasi yang digunakan dalam perhitungan adalah 100%

**Persentase pelaksanaan pengawasan tidak terjadwal telah mencapai 509,18%, namun dengan memperhatikan batasan capaian, maka realisasi yang digunakan dalam perhitungan adalah 100%

***Tingkat Pelaksanaan Pengawasan = $(a \times 50\%) + (b \times 50\%)$

- c. Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II didapatkan dari perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan, dengan bobot sesuai tahapan pengaduan;

- 1) SPT : 25%
- 2) Konsep LHADTT : 50%
- 3) LHADTT dan SP : 100%

Sampai Bulan Desember Tahun 2025, Inspektorat II menerima 2 penerusan pengaduan dari Inspektorat VI dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II

No	Nomor Surat	Perihal	Nomor SPT	Progres	Tingkat Penanganan Pengaduan (%)
1	263/ND/If/2025 Tanggal 3 Oktober 2025	Penerusan Pengaduan WisPU-2025/0241 & WisPU-2025/0242	1186/SPT/lj/2025 Tanggal 31 Oktober 2025	LHA ADTT Nomor 1/2/2/3/2025/286 Tanggal 11 Desember 2025	100
2	287/ND/If/2025 Tanggal 16 Oktober 2025	Penerusan Pengaduan WisPU-2025/0255	1185/SPT/lj/2025 Tanggal 30 Oktober 2025	LHA ADTT Nomor 1/2/2/3/2025/291 Tanggal 15 Desember 2025	100
Tingkat Penanganan Pengaduan					100

Realisasi penanganan pengaduan telah melebihi target tahun 2025 yang direncanakan (85%);

- d. Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II didapatkan dari jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang telah ditindaklanjuti, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi, dengan perbandingan:

- 1) Itjen 50% (Belum Tuntas: 0%, Tuntas: 100%)
- 2) BPKP 25% (Belum Tuntas: 0%, Tuntas: 100%)
- 3) BPK 25% (Belum Tuntas: 0%, Memadai sesuai Hasil Verifikasi Itjen: 75%, Tuntas pada SIPTL: 100%)

Realisasi Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II pada tahun 2025 sebesar 84,36%. Hal ini telah melebihi target tahun 2025 yang telah direncanakan (75,5%). Komposisi tindak lanjut rekomendasi LHP terdiri dari Rekomendasi BPK, BPKP, dan Itjen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perhitungan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi LHP

Uraian	Rekomendasi BPK (25%)				Rekomendasi BPKP (25%)			Rekomendasi Itjen (50%)			Nilai TL LHP (%)
	Rek	Tuntas (SIPTL)	Tuntas (Verifikasi Itjen)	% (a)	Rek	Tuntas	% (b)	Rek	Tuntas	% (c)	
Jumlah Rekomendasi	1950	1513	24,75	78,86	4404	4055	92,08	4942	4114	83,25	84,36

Cara perhitungan:

$$a) \text{ Rekomendasi BPK} = \frac{\text{Jumlah Tuntas (SIPTL)} + \text{Tuntas (Verifikasi Itjen)}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$$

$$b) \text{ Rekomendasi BPKP} = \frac{\text{Jumlah Tuntas}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$$

$$c) \text{ Rekomendasi Itjen} = \frac{\text{Jumlah Tuntas}}{\text{Jumlah Rekomendasi}} \times 100\%$$

$$d) \text{ Nilai TL LHP} = (a \times 25\%) + (b \times 25\%) + (c \times 50\%)$$

- e. Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat II didapatkan dari tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang disusun tepat waktu yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 4 Oktober 2025 di Kota Bekasi berdasarkan SPT Nomor 950/SPT/lj/2025 tanggal 30 September 2025 dengan *output* PKPT Inspektorat II TA 2026. Hal ini telah melebihi target yang ditentukan (100%);
- f. Tingkat Predikat SAKIP Inspektorat II didapatkan dari Kategori Nilai Hasil Evaluasi Implementasi atas AKIP berdasarkan Surat Inspektur V Nomor PW 0204-Ie/32 Tanggal 11 Juni 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2024 pada Inspektorat II, Inspektorat II mendapatkan kategori A (Memuaskan) dengan nilai 80,80. Hal ini telah melebihi dari target yang ditentukan (80,7);
- g. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 Inspektorat II didapatkan dari Nilai Efektivitas Penerapan MR berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Pimpinan UKI Nomor PW 0204-Is/449 Tanggal 7 Mei 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T2 Inspektorat II Tahun Anggaran 2024, Inspektorat II mendapatkan level 4 dengan nilai 88,64. Hal ini telah melebihi dari target yang ditentukan (77);
- h. Transformasi Digital Inspektorat II didapatkan dari Nilai Transformasi Digital Inspektorat II berdasarkan Surat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor PA 0101-Sd/1090 Tanggal 1 Desember 2025 Hal Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, Inspektorat II mendapatkan nilai 86,54 (Sudah Transformasi Digital). Hal ini telah melebihi target yang ditentukan (30);
- i. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II didapatkan dari Nilai Audit Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor UM0202-Sj/1434 Tanggal 31 Oktober 2025 Hal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025, Inspektorat II mendapatkan kategori CC – Cukup dengan nilai 55,48. Hal ini telah melebihi dari target yang ditentukan (40).

Terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya seluruh indikator Sasaran Kegiatan 2.2, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II, yaitu:

- a. Komitmen Pimpinan untuk mendorong seluruh pegawai Inspektorat II melaksanakan tugas pengawasan intern yang berkualitas sesuai dengan nilai *core value* ASN yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);

- b. Adanya peningkatan kapasitas pegawai Inspektorat II dalam mendukung pengawasan intern di bidang Bina Marga diantaranya Diklat Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK), Diklat Evaluasi Tata Kelola TI dan Audit TIK, Diklat Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Diklat Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Diklat Audit BMN, Audit Keamanan SPBE Sektor Pemerintahan, Sosialisasi Pedoman Telaah Sejawat Ekstern, dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;
- c. Adanya dukungan manajemen pengawasan dari Subbagian Tata Usaha dalam menyediakan data, informasi dan memfasilitasi sarana prasarana serta pengadministrasian untuk membantu kegiatan pengawasan intern dan pelaporan kepada pimpinan;
- d. Adanya koordinasi yang baik dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan pengendalian internal Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai unit organisasi yang diawasi;
- e. Pengimplementasian manajemen risiko dalam mencapai tujuan pencapaian kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur II.

Faktor diatas memberikan kontribusi terhadap capaian target fisik (*output*) Inspektorat II sebesar 100% di Tahun 2025.

3.2.2 Analisis Capaian *Output* Kegiatan

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) tahun 2025 di atas didukung oleh salah satu indikator Persentase Pengawasan di Inspektorat II yang mencapai 368,13% atau secara capaian telah mencapai 100% yang tergambar dalam Capaian *Output* Kegiatan (OK) tahun 2025. Target dan Capaian OK Inspektorat II sampai dengan Desember 2025 ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Capaian *Output* Kegiatan Inspektorat II Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/ <i>Output</i> / Suboutput/Komponen/Subkomp/ Akun/Detail	Target		Realisasi	% Terhadap Target
		Vol	Satuan		
WA	Program Dukungan Manajemen				
7754	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU				
7754.AEC	Kerja sama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)				
7754.AEC.002	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat II	1	Kegiatan	35	3500%
7754.EBD.021	Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga				
7754.EBD.021.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Bina Marga	25	Laporan	116	464,00%
7754.EBD.021.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Bina Marga	10	Laporan	12	120,00%
7754.EBD.021.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Bina Marga	54	Laporan	136	251,85%
7754.EBD.021.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Bina Marga	22	Laporan	246	1118,18%
7754.EBD.021.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Bina Marga	9	Laporan	12	133,33%
7754.EBD.021.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II	1	Laporan	1	100,00%
7754.EBD.021.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II	14	Laporan	14	100,00%
7754.EBD.021.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat II	2	Laporan	2	100,00%
7754.EBD.021.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II	1	Laporan	1	100,00%
7754.EBD.022	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga				
7754.EBD.022.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga	8	Laporan	7	87,50%
7754.EBD.023	Layanan Audit Kinerja Bidang Bina Marga				
7754.EBD.023.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Bina Marga	7	Laporan	7	100,00%
7754.EBD.024	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga				

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Suboutput/Komponen/Subkomp/ Akun/Detail	Target		Realisasi	% Terhadap Target
		Vol	Satuan		
7754.EBD.024.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga	2	Laporan	2	100,00%
7754.EBD.025	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga				
7754.EBD.025.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga	4	Laporan	5	125,00%
Total		160	Laporan	596	372,50%

Seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di Inspektorat II telah sesuai dengan Standar dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengawasan di Inspektorat II telah memenuhi target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Bina Marga telah melebihi target yang direncanakan yaitu 35 kegiatan (3500%) berupa Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI sebanyak 35 kegiatan.
- b. Pelaksanaan Audit di Inspektorat II telah menghasilkan 116 laporan dan telah melebihi target sebesar 25 laporan yang terdiri atas pelaksanaan kegiatan:
 - 1) ADTT Verifikasi Tindak Lanjut LHP BPK-RI sebanyak 108 laporan (93,10%);
 - 2) ADTT Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi atas Pemberian Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebanyak 6 laporan (5,17%);
 - 3) ADTT Penelitian Awal Pengaduan Masyarakat sebanyak 2 laporan (1,72%).
- c. Pelaksanaan Evaluasi di Inspektorat II tahun 2025 telah menghasilkan 12 laporan dan telah melebihi target sebesar 10 laporan yang terdiri atas pelaksanaan kegiatan:
 - 1) Evaluasi Implementasi AKIP Intern Inspektorat Jenderal TA 2024 sebanyak 1 laporan (8,33%);
 - 2) Evaluasi Implementasi AKIP Unit Organisasi TA 2024 sebanyak 1 laporan (8,33%);
 - 3) Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko Ditjen Bina Marga sebanyak 1 laporan (8,33%);
 - 4) Evaluasi Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit Organisasi sebanyak 1 laporan (8,33%);
 - 5) Evaluasi Telaah Sejawat Intern TA 2025 sebanyak 8 laporan (66,67%).
- d. Pelaksanaan Pemantauan di Inspektorat II tahun 2025 telah menghasilkan 136 laporan dan telah melebihi target sebesar 54 laporan yang terdiri atas:
 - 1) 135 Surat Hasil Penilaian Tindak Lanjut (SHPTL) (99,26%);
 - 2) 1 Laporan Hasil Pemantauan Lainnya (0,74%);.
- e. Pelaksanaan Reviu di Inspektorat II di Inspektorat II tahun 2025 telah menghasilkan 253 laporan dan telah melebihi target sebesar 83 laporan yang terdiri atas pelaksanaan kegiatan:
 - 1) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sebanyak 2 laporan (0,79%);
 - 2) Reviu Revisi Anggaran sebanyak 22 laporan (8,69%);
 - 3) Reviu Administrasi Usulan Baru dan/atau Perpanjangan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebanyak 246 laporan (97,23%);
 - 4) Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak Tanggap Darurat sebanyak 18 laporan (7,11%).

- f. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya di Inspektorat II tahun 2025 telah menghasilkan 12 Laporan terhadap target sebesar 9 laporan yang terdiri atas pelaksanaan kegiatan:
 - 1) Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko sebanyak 3 laporan (25%);
 - 2) Pendampingan Lainnya sebanyak 7 laporan (58,33%);
 - 3) Pembahasan Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI di Direktorat Jenderal Bina Marga sebanyak 1 laporan (8,33%);
 - 4) Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas atas Tindak Lanjut Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis sebanyak 1 laporan (8,33).
- g. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II tahun 2025 telah menghasilkan 1 laporan (100%) berupa PKPT Inspektorat II TA 2026;
- h. Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II tahun 2025 telah menghasilkan 14 Laporan berupa:
 - 1) Laporan Rencana Aksi Kinerja sebanyak 1 laporan (7,14%);
 - 2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan sebanyak 12 laporan (85,71%);
 - 3) Laporan Kinerja sebanyak 1 laporan (7,14%).
- i. Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat II telah menghasilkan 2 laporan berupa:
 - 1) Laporan Profil Risiko dan Rencana Respon Risiko sebanyak 1 laporan (50%);
 - 2) Laporan Penerapan Manajemen Risiko sebanyak 1 laporan (50%).
- j. Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II telah menghasilkan Laporan Dukungan Manajemen Inspektorat II sebanyak 1 laporan (100%);
- k. Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga telah menghasilkan 7 laporan terhadap target 8 laporan yang terdiri atas pelaksanaan kegiatan:
 - 1) Audit Ketaatan Pengelolaan PNBPN TA 2024 dan TA 2025 sebanyak 2 laporan (28,57%);
 - 2) ADTT Ketaatan PBJ Implementasi P3DN Unit Organisasi sebanyak 1 laporan (14,29%);
 - 3) ADTT Perencanaan dan Manfaat, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan sebanyak 1 laporan (14,29%);
 - 4) ADTT Lanjutan Penanganan Pengaduan sebanyak 1 laporan (14,29%);
 - 5) ADTT Lainnya sebanyak 2 laporan (28,57%).

Terdapat 1 laporan yang belum selesai yaitu Laporan Hasil ADTT Perencanaan dan Manfaat, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga yang sampai laporan ini disusun masih dalam proses perbaikan hasil revisi Inspektur Jenderal.
- l. Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Bina Marga telah menghasilkan 7 laporan terhadap target 7 laporan yang terdiri atas pelaksanaan kegiatan:
 - 1) Audit Kinerja Level Program Infrastruktur Konektivitas IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional sebanyak 5 laporan (71,43%);
 - 2) Audit Kinerja Program Strategis Lintas Sektor pada Kegiatan Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebanyak 2 laporan (28,57%).
- m. Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga telah menghasilkan 2 laporan terhadap target 2 laporan yang terdiri atas pelaksanaan kegiatan:

- 1) Reviu RKAKL TA 2026 – Pagu Anggaran sebanyak 1 laporan (50%);
 - 2) Reviu RKAKL TA 2026 – Alokasi Anggaran sebanyak 1 laporan (50%).
- n. Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga telah menghasilkan 5 laporan terhadap target 4 laporan yang terdiri atas pelaksanaan kegiatan:
- 1) Reviu Laporan Keuangan TA 2024 sebanyak 2 laporan (40%);
 - 2) Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2025 sebanyak 3 laporan (60%)

Pencapaian Kinerja Inspektorat II didukung oleh anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sepanjang tahun 2025, Inspektorat II mengalami penambahan anggaran senilai Rp50.452.000 karena adanya Revisi DIPA ke-14 Tanggal 12 Desember 2025 dan Revisi POK ke-11 Tanggal 23 Desember 2025. Tema Revisi berupa Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap (Satker Revisi ke-11) dengan mekanisme pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian Kinerja Inspektorat II tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode Renstra 2020-2024 ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	83%	92%	111%	87%	94%	108%	76,61%	87,85%	114,67%
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	90	94,14	105%	90	94,42	105%	94,50	94,95	100,48%
2 2023 dan 2024 Persentase Pengawasan Inspektorat II 2025 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II	85%	100%	118%	90%	100%	111%	85%	100%	117,65%
3 2023 dan 2024 Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat 2025 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II	90%	93,65%	104%	95%	98%	103%	85%	100	117,65%
4 2023 dan 2024 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II 2025 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II	60%	68%	113%	65%	75%	115%	75,5%	84,36	111,74%
5 Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi	82%	96,53%	118%	92%	96,47	105%			
a. Kesesuaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian PUPR (Hasil Penjaminan Kualitas oleh Itjen terhadap Hasil Evaluasi BPKP)	92,5%	97,3%	105%	95%	95,48%	101%			
b. Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T1	4,00	4,00	100%	4,00	4,00	100%			

SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
c. Persentase Penerapan Manajemen Risiko	65%	99%	152%	85%	100%	118%			
5 Tingkat Perencanaan UPKPT							100%	100%	100%
6 Nilai SAKIP Inspektorat II							A (Nilai 80,70)	A (Nilai 80,80)	100,12%
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 Inspektorat II							4 (Nilai 77)	4 (Nilai 88,64)	115,17%
8 Transformasi Digital Inspektorat II							30	86,54	288,48%
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II							40	55,48	138,70%

Terdapat perbedaan metode perhitungan indikator kinerja pada periode Renstra 2020-2024 dengan Renstra 2025-2029, dimana cara perhitungan Hasil Pengawasan Penerapan SPIP dan MR terhadap Unit Organisasi yang diawasi diganti dengan Tingkat Perencanaan UPKPT, Nilai SAKIP Inspektorat II, Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 Inspektorat II, Transformasi Digital Inspektorat II, dan Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II.

Capaian kinerja Inspektorat II tahun 2025 tidak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan awal periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, dengan adanya penyesuaian metode perhitungan indikator kinerja, meskipun sasaran kegiatan dan indikator kinerja tidak mengalami perubahan.

3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian Kinerja Inspektorat II tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra 2020 - 2024 ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	URAIAN	TARGET					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
SK 2.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II							
IKK 2.2 Persentase Tingkat Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Target (%)	70	74	78	83	87	76,61
	Realisasi (%)	83,83	84	91	92	94	87,85
	Capaian (%)	120	114	117	111	108	114,67

Perbandingan capaian kinerja jangka menengah belum dapat dilakukan karena tahun 2025 merupakan tahun awal periode Renstra 2025 - 2029, sehingga data pembandingan jangka menengah belum tersedia.

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Unit Kerja Lain (*Benchmarking*)

Benchmarking Capaian Kegiatan dilakukan terhadap Unit Kerja lain yang sejenis yaitu Inspektorat IV karena memiliki Indikator Kinerja Kegiatan yang sejenis sesuai dengan Renstra 2025-2029.

Tabel 3. 9 Perbandingan Kinerja Inspektorat II dengan Unit Kerja Lain

SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
			INSP II	INSP IV
SASARAN KEGIATAN 2.2: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	76,61	87,85	83,91
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	Nilai	94,50	93,13	94,12
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II	%	85	100	94,12
3 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II	%	85	100	100
4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II	%	75,5	84,36	71,85
5 Tingkat Perencanaan UPKPT	%	100	100	100
6 Nilai SAKIP Inspektorat II	Kategori	A (Nilai 80,70)	A (Nilai 80,80)	A (Nilai 81,80)
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 Inspektorat II	Level	4 (Nilai 77)	4 (Nilai 88,64)	4 (Nilai 87,92)
8 Transformasi Digital Inspektorat II	Nilai	30	86,54	66,13
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	40	55,48	53,86

Jika dibandingkan dengan Inspektorat IV, terdapat perbedaan terhadap unit organisasi yang diawasi, Inspektorat IV mengawasi unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, sedangkan Inspektorat II mengawasi Direktorat Jenderal Bina Marga. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II sebesar 87,85% lebih besar dari pencapaian Inspektorat IV yaitu 83,91%. Indikator kinerja yang realisasinya lebih tinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II;
- 2) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II;
- 3) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 Inspektorat II;
- 4) Transformasi Digital Inspektorat II;
- 5) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II.

Sedangkan indikator kinerja yang lebih rendah dan masih perlu ditingkatkan adalah Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP dan Nilai SAKIP Inspektorat II. Inspektorat II akan terus meningkatkan capaian kinerja kedepannya dengan mengadopsi praktik baik dari Inspektorat IV dan mempedomani peraturan terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja sehingga mendapatkan nilai Telaah Sejawat Internal dan SAKIP yang optimal.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Alokasi dana secara langsung berdampak pada kemampuan organisasi untuk secara efektif melaksanakan

tanggung jawab dan mencapai tujuannya. Anggaran yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal merupakan bagian dari DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Sepanjang tahun 2025, terjadi perubahan anggaran DIPA Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan matriks perubahan sebagai berikut:

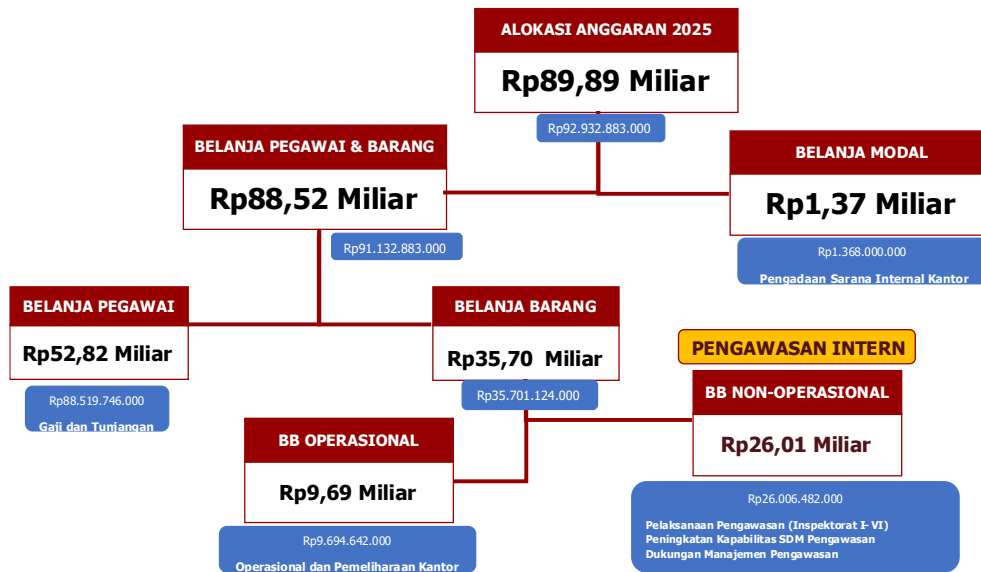
Tabel 3. 10 Matriks Revisi Anggaran Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal TA 2025

No	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor dan Tanggal DIPA	Keterangan Revisi
1	Februari	DIPA Revisi ke-1	21 Februari 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 21 Februari 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pembukaan blokir Hal IV.A DIPA sebesar Rp14.367.693.000 - Pencantuman Blokir Penghematan/Efisiensi sebesar Rp13.577.901.000 (Revisi dalam rangka pelaksanaan anggaran TA 2025 dan pelaksanaan kebijakan Efisiensi Anggaran)
2	Februari	Satker Revisi ke-1	24 Februari 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 24 Februari 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
3	Maret	Satker Revisi ke-2	12 Maret 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 12 Maret 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
4	Maret	DIPA Revisi ke-2	17 Maret 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 17 Maret 2025	Tema Revisi:Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Untuk update data OM SPAN atas Pemutakhiran POK dan Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
5	Maret	DIPA Revisi ke-3	21 Maret 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 21 Maret 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pembukaan Blokir Halaman IV.A DIPA sebesar Rp4.916.139.000,00 (dalam rangka relaksasi buka blokir anggaran untuk pelaksanaan kebutuhan minimum tugas dan fungsi dasar Inspektorat Jenderal)
6	April	DIPA Revisi ke-4	24 April 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 24 April 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: -Pemutakhiran POK -Perubahan Hal III DIPA
7	Mei	Satker Revisi ke-3	8 Mei 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 8 Mei 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka penyelesaian pagu minus dan pemenuhan kegiatan percepatan TL BPK RI)
8	Juli	Satker Revisi ke - 4	10 Juli 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 10 Juli 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
9	Juli	DIPA Revisi ke-5	11 Juli 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 11 Juli 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: -Pemutakhiran POK -Perubahan Hal III DIPA Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama

No	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor dan Tanggal DIPA	Keterangan Revisi
10	Juli	Satker Revisi ke - 5	24 Juli 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 24 Juli 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (dalam rangka penyelesaian pagu minus dan pemenuhan kegiatan PRESTASI)
11	Agustus	DIPA Revisi ke-6	7 Agustus 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 7 Agustus 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: - Pemutakhiran POK - Perubahan Hal III DIPA Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
12	Agustus	DIPA Revisi ke-7	12 Agustus 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pembukaan Blokir Efisiensi (Kode A) sebesar Rp8.652.162.000 dalam rangka melaksanakan PKPT termasuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang menjadi instruksi dan prioritas Presiden sampai dengan akhir Tahun 2025.
13	September	DIPA Revisi ke-8	22 September 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 22 September 2025	Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap - Pergeseran antar-Kegiatan, antar-KRO, antar-RO, antar-Komponen, dan antar-Akun dalam 1 (satu) Satker yang sama; - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA (dalam rangka - Pemenuhan kekurangan Belanja Operasional untuk kebutuhan Belanja Pegawai sebesar Rp4.900.400.000,00 dalam rangka pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja bagi PNS sejumlah 294 orang, CPNS sejumlah 11 orang (TMT 1 Juni 2025), dan rencana pengangkatan PPPK sejumlah 38 orang (TMT 1 Oktober 2025) serta - Pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan pengawasan sampai dengan akhir Desember 2025 pada Satuan Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
14	Oktober	DIPA Revisi ke-9	15 Oktober 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 15 Oktober 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pemutakhiran POK Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (penyelesaian pagu minus untuk kegiatan pengawasan)
15	Oktober	DIPA Revisi ke-10	20 Oktober 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 20 Oktober 2025	Tema Revisi: Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi: Pergeseran anggaran antar-unit Eselon I dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga dalam rangka pemenuhan kekurangan belanja pegawai yang diperoleh dari Ditjen BM sebesar Rp1.020.262.000
16	Oktober	DIPA Revisi ke-11	27 Oktober 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 2 Desember 2024	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pemutakhiran POK Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama (penyelesaian pagu minus untuk kegiatan pengawasan)

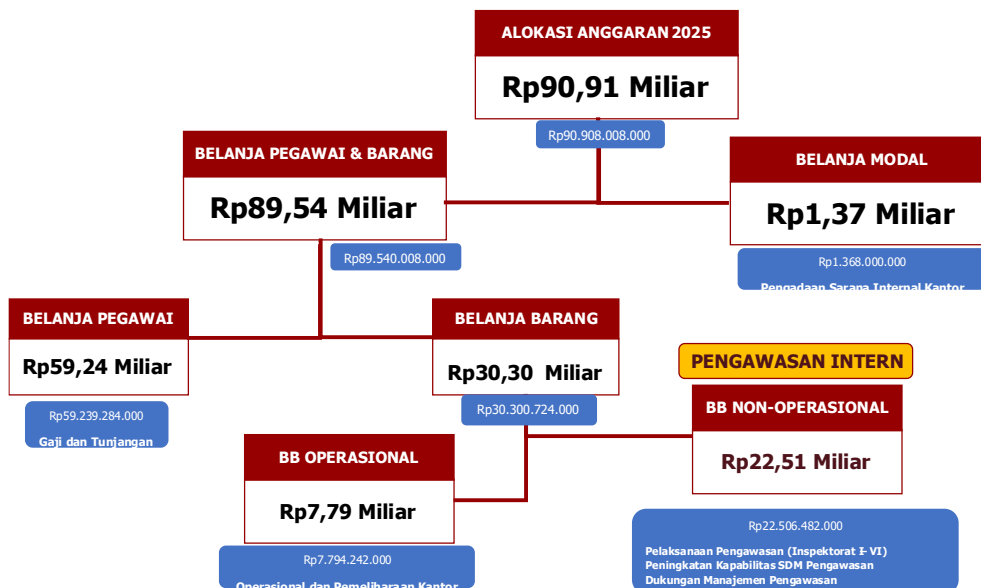
No	Bulan	Jenis Revisi	Tanggal Revisi	Nomor dan Tanggal DIPA	Keterangan Revisi
17	November	DIPA Revisi ke-12	03 November 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 2 Desember 2024	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Pencantuman Catatan pada Halaman IVB DIPA berupa Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sejumlah 1 (satu) Unit.
18	November	Satker Revisi ke-6	07 November 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 2 Desember 2024	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
19	November	DIPA Revisi ke-13	12 November 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 12 November 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO, antar-KRO, antar-Kegiatan dalam rangka: - pemenuhan alokasi untuk kegiatan MoU, baik berupa kegiatan MoU baru maupun perpanjangan - pelaksanaan diklat untuk Auditor
20	November	Satker Revisi ke-7	21 November 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 21 November 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
21	Desember	Satker Revisi ke-8	5 Desember 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 5 Desember 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
22	Desember	Satker Revisi ke-9	12 Desember 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 12 Desember 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
23	Desember	DIPA Revisi ke-14	12 Desember 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 12 Desember 2025	Tema Revisi: Revisi Administrasi Mekanisme Revisi: Untuk update data OM SPAN atas: - Pemutakhiran POK - Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
24	Desember	Satker Revisi ke-10	19 Desember 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 19 Desember 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
25	Desember	Satker Revisi ke-11	23 Desember 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 23 Desember 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama
26	Desember	Satker Revisi ke-12	31 Desember 2025	SP DIPA-145.02.1.693746/2025 Tanggal 31 Desember 2025	Tema Revisi: Pergeseran Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Tetap Mekanisme Revisi : Pergeseran anggaran antar-Akun, antar-Komponen, antar-RO dalam KRO yang sama

Adapun pohon anggaran awal dan revisi dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: DIPA Petikan Awal Nomor SP DIPA-145.02-0/2025 Tanggal 2 Desember 2024

Gambar 3. 1 Pohon Anggaran DIPA Awal



Sumber: DIPA Revisi ke-14 Nomor SP DIPA- 145.02.1.693746/2025 Tanggal 12 Desember 2025

Gambar 3. 2 Pohon Anggaran DIPA Revisi

Pada Tahun Anggaran 2025 alokasi anggaran Inspektorat II dalam DIPA Inspektorat Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Alokasi Anggaran Inspektorat II TA 2025

Kode	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PK Awal	PK Revisi Akhir
WA	Program Dukungan Manajemen		
7754	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU		
7754.AEC	Kerja sama (Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan)	150.000.000	125.840.000
7754.AEC.002	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat II	150.000.000	125.840.000

Kode	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PK Awal	PK Revisi Akhir
7754.AEC.002.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Bina Marga	150.000.000	125.840.000
2392.AFA.002	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat II	50.000.000	16.680.000
2302.AFA.002.051A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat II	50.000.000	16.680.000
7754.EBD.021	Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga	14.372.399.000	786.350.000
7754.EBD.021.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Bina Marga	787.932.000	1.920.000
7754.EBD.021.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Bina Marga	94.002.000	3.500.000
7754.EBD.021.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Bina Marga	50.000.000	19.617.000
7754.EBD.021.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Bina Marga	100.000.000	3.675.000
7754.EBD.021.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Bina Marga	100.000.000	686.109.000
7754.EBD.021.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II	143.930.000	3.150.000
7754.EBD.021.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II	50.000.000	3.150.000
7754.EBD.021.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat II	50.000.000	3.150.000
7754.EBD.021.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II	50.000.000	62.079.000
7754.EBD.022	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga	150.000.000	366.267.000
7754.EBD.022.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga	391.957.000	366.267.000
7754.EBD.023	Layanan Audit Kinerja Bidang Bina Marga	391.957.000	789.089.000
7754.EBD.023.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Bina Marga	434.928.000	789.089.000
7754.EBD.024	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga	434.928.000	33.660.000
7754.EBD.024.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga	105.741.000	33.660.000
7754.EBD.025	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga	105.741.000	5.600.000
7754.EBD.025.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga	145.188.000	5.600.000
Total		2.065.746.000	2.116.198.000

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025

Realisasi anggaran Inspektorat II tahun 2025 senilai Rp1.291.228.480 atau sebesar 60,81% sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2025

Kode	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Terhadap Pagu	Sisa (Rp)
WA	Program Dukungan Manajemen				
7754	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU				
7754.AEC.002	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat II	125.840.000	124.390.707	98,85%	1.449.293

Kode	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Terhadap Pagu	Sisa (Rp)
7754.AEC.002.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Bina Marga	125.840.000	124.390.707	98,85%	1.449.293
2392.AFA.002	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat II	16.680.000	0	0%	16.680.000
2302.AFA.002.051A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat II	16.680.000	0	0%	16.680.000
7754.EBD.021	Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga	786.350.000	315.685.275	40,15%	463.376.725
7754.EBD.021.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Bina Marga	1.920.000	0	0,00%	1.920.000
7754.EBD.021.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Bina Marga	3.500.000	288.000	8,23%	3.212.000
7754.EBD.021.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Bina Marga	19.617.000	18.521.817	94,42%	1.095.183
7754.EBD.021.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Bina Marga	3.675.000	0	0,00%	3.675.000
7754.EBD.021.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Bina Marga	678.821.000	281.482.827	41,03%	397.338.173
7754.EBD.021.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II	3.150.000	542.743	17,23%	2.607.257
7754.EBD.021.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II	3.150.000	648.000	20,57%	2.502.000
7754.EBD.021.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat II	3.150.000	480.000	15,24%	2.670.000
7754.EBD.021.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II	62.079.000	13.721.888	22,10%	48.357.112
7754.EBD.022	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga	366.267.000	290.674.030	79,36%	75.592.970
7754.EBD.022.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga	366.267.000	290.674.030	79,36%	75.592.970
7754.EBD.023	Layanan Audit Kinerja Bidang Bina Marga	789.089.000	549.106.348	69,59%	239.982.652
7754.EBD.023.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Bina Marga	789.089.000	549.106.348	69,59%	239.982.652
7754.EBD.024	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga	33.660.000	11.372.120	33,79%	22.287.880
7754.EBD.024.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga	33.660.000	11.372.120	33,79%	22.287.880
7754.EBD.025	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga	5.600.000	0	0,00%	5.600.000
7754.EBD.025.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga	5.600.000	0	0,00%	5.600.000
Total		2.116.198.000	1.291.228.480	61,02%	824.969.520

Penyerapan anggaran di Inspektorat II tidak mencapai 100% karena terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di kantor antara lain:

- 1) ADTT Perencanaan dan Manfaat, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengadaan Barang/ Jasa, dan Hal Lain di Bidang Keuangan;
- 2) ADTT Verifikasi TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI;
- 3) ADTT Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi atas Pemberian Rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- 4) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
- 5) Reviu Administrasi Usulan Baru dan/atau Perpanjangan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak;
- 6) Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak Tanggap Darurat;
- 7) Reviu Laporan Keuangan;
- 8) Rencana dan Evaluasi Kinerja;
- 9) Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko;
- 10) Layanan Kepegawaian dan Umum.

Selain itu terdapat anggaran Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan yang tidak direalisasikan karena tidak terdapat target penyusunan NSPK oleh Inspektorat II pada tahun 2025.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Secara umum, penyerapan anggaran TA 2025 mengalami penurunan sebesar 36,36% jika dibandingkan dengan penyerapan TA 2024. Adapun anggaran yang tidak terserap pada TA 2025 sebanyak Rp824.969.520.

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dan 2025

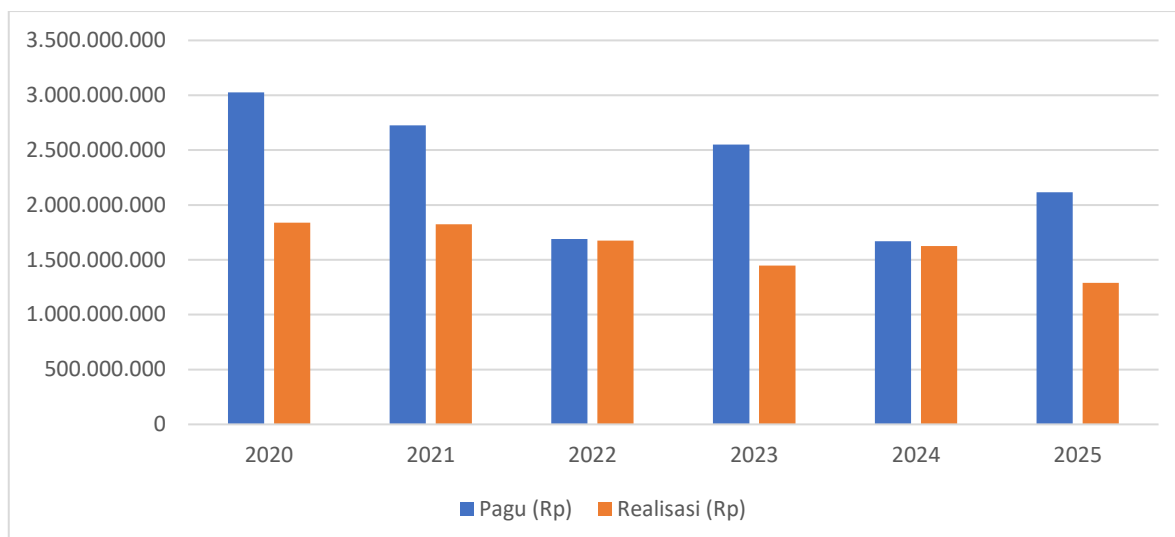
Kode	Program/Kegiatan/Output/ Suboutput/ Komponen/ Subkomponen/Akun/Detail	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	%	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	%
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU						
2392.AEC	Kerjasama						
2392.AEC.001	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat II	28.316	28.314	99,99%	125.840	124.390,7	98,85%
2392.AEC.001.051	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Bina Marga	28.316	28.314	99,99%	125.840	124.390,7	98,85%
2392.AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria						
2392.AFA.002	Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat II	5.000	317	6,34%	16.680	0	0%
2302.AFA.002.051A	Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat II	5.000	317	6,34%	16.680	0	0%
2392.EBD	Layanan Pengawasan Internal						
2392.EBD.002	Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga	1.635.028	1.596.022	97,61%	786.350	315.685,28	40,15%
2392.EBD.002.051	Pelaksanaan Audit di Inspektorat II	1.144.280	1.137.195	99,38%	1.920	0	0,00%
2392.EBD.002.052	Pelaksanaan Evaluasi di Inspektorat II	3.770	762	20,21%	3.500	288	8,23%
2392.EBD.002.053	Pelaksanaan Pemantauan di Inspektorat II	20.768	18.468,5	88,93%	19.617	18.521,817	94,42%
2392.EBD.002.054	Pelaksanaan Reviu di Inspektorat II	116.000	112.574,6	97,05%	3.675	0	0,00%
2392.EBD.002.055	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya di Inspektorat II	284.913	280.308	98,38%	678.821	281.482,83	41,03%

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Suboutput/ Komponen/ Subkomponen/Akun/Detail	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	%	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	%
2392.EBD.002. 056. A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan	5.000	2.318	46,36%	3.150	542.743	17,23%
2392.EBD.002. 056. B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II	4.380	3.121	71,26%	3.150	648	20,57%
2392.EBD.002. 056. C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat II	2.000	790	39,50%	3.150	480	15,24%
2392.EBD.002. 056. D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II	53.917	40.485	75,09%	62.079	13.721,888	22,10%
7754.EBD.022	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga				366.267	290.674,03	79,36%
7754.EBD.022. 051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga				366.267	290.674,03	79,36%
7754.EBD.023	Layanan Audit Kinerja Bidang Bina Marga				789.089	549.106,35	69,59%
7754.EBD.023. 051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Bina Marga				789.089	549.106,35	69,59%
7754.EBD.024	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga				33.660	11.372,12	33,79%
7754.EBD.024. 051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga				33.660	11.372,12	33,79%
7754.EBD.025	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga				5.600	0	0,00%
7754.EBD.025. 051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga				5.600	0	0,00%
Total		1.668.344	1.624.653	97,38%	2.116.198	1.291.228	61,02%

Realisasi Anggaran Inspektorat II pada tahun 2025 sebesar 61,02% dengan capaian *output* kegiatan telah melebihi target yaitu 596 laporan dari target 160 laporan (372,50%). Jumlah permintaan kegiatan pengawasan yang melampaui Program Pengawasan yang telah ditetapkan mengharuskan Inspektorat II melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien, yaitu dengan cara menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan dan tingkat risiko, optimalisasi teknologi dan data, *desk* Audit dan klarifikasi daring, serta pemeriksaan lapangan yang dilakukan secara selektif. Adapun perbandingan realisasi anggaran selama tahun 2020 s.d 2025 adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat II TA 2020 s.d 2025

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
2025	2.116.198.000,00	1.291.228.000,00	61,02
2024	1.668.344.000,00	1.624.653.317,00	97,38
2023	2.550.000.000,00	1.446.813.567,00	56,74
2022	1.689.000.000,00	1.675.560.431,00	99,20
2021	2.726.898.000,00	1.822.674.824,00	66,84
2020	3.025.241.000,00	1.838.602.000,00	60,78



Gambar 3. 3 Diagram Realisasi Anggaran Inspektorat II TA 2020 – 2025

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1) Efisiensi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2025, Inspektorat II didukung oleh 36 PNS dan 3 PPPK, dengan jumlah pegawai yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penambahan jumlah pegawai, seluruh target kinerja yang telah ditetapkan tetap dapat dicapai secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia telah dilakukan secara efektif dan efisien, antara lain melalui pengaturan penugasan yang tepat, peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi peran pegawai sesuai dengan kompetensi masing-masing, sehingga penambahan sumber daya manusia mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

2) Efisiensi Sarana dan Prasarana

Inspektorat II telah didukung oleh ketersediaan teknologi informasi berupa laptop, akses jaringan internet, printer, serta berbagai aplikasi pendukung dalam pelaksanaan tugas. Hal ini memungkinkan proses kerja dilaksanakan lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi juga mendukung efisiensi pelaksanaan koordinasi dan komunikasi, baik internal maupun eksternal, melalui pemanfaatan media daring untuk rapat. Dengan demikian, penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya, sehingga Inspektorat II mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta mendukung terjadinya peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, realisasi anggaran Inspektorat II sebesar 60,81%, mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024 yang sebesar 97,38%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran, di mana pencapaian kinerja organisasi dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah. Efisiensi anggaran Inspektorat II diukur dari perbandingan realisasi *output* dengan realisasi anggaran. Perbandingan realisasi anggaran dengan realisasi *output* Inspektorat II Tahun 2025 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi *Output* Inspektorat II Tahun 2025

Kode	KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi <i>Output</i>		
			Rp	%	Target	Realisasi	%
7754.AEC.002	Kerjasama Antar Lembaga di Inspektorat II						
7754.AEC.002.051.A	Koordinasi Kelembagaan dalam Rangka Penguatan Pengawasan Bidang Bina Marga	125.840.000	124.390.707	98,85%	1	35	3500%
2392.AFA.002	Penyusunan Rancangan NSPK Pengawasan di Inspektorat II	16.680.000	0	0,00%	0	0	0,00%
2302.AFA.002.051A	Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Peraturan Bidang Pengawasan di Inspektorat II	16.680.000	0	0,00%	0	0	0,00%
7754.EBD.021	Layanan Pengawasan Bidang Bina Marga						
7754.EBD.021.051.A	Pelaksanaan Audit Bidang Bina Marga	1.920.000	0	0,00%	25	116	464,00%
7754.EBD.021.052.A	Pelaksanaan Evaluasi Bidang Bina Marga	3.500.000	288.000	8,23%	10	12	120,00%
7754.EBD.021.053.A	Pelaksanaan Pemantauan Bidang Bina Marga	19.617.000	18.521.817	94,42%	54	136	251,85%
7754.EBD.021.054.A	Pelaksanaan Reviu Bidang Bina Marga	3.675.000	0	0,00%	22	246	1118,18%
7754.EBD.021.055.A	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Bidang Bina Marga	678.821.000	281.482.827	41,03%	9	12	133,33%
7754.EBD.021.056.A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II	3.150.000	542.743	17,23%	1	1	100,00%
7754.EBD.021.056.B	Rencana dan Evaluasi Kinerja di Inspektorat II	3.150.000	648.000	20,57%	14	14	100,00%
7754.EBD.021.056.C	Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko di Inspektorat II	3.150.000	480.000	15,24%	2	2	100,00%
7754.EBD.021.056.D	Layanan Kepegawaian dan Umum di Inspektorat II	62.079.000	13.721.888	22,10%	1	1	100,00%
7754.EBD.022	Layanan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga						
7754.EBD.022.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bidang Bina Marga	366.267.000	290.674.030	79,36%	8	7	87,50%
7754.EBD.023	Layanan Audit Kinerja Bidang Bina Marga						
7754.EBD.023.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Audit Kinerja Bidang Bina Marga	789.089.000	549.106.348	69,59%	7	7	100,00%
7754.EBD.024	Layanan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga						
7754.EBD.024.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu RKA-K/L Bidang Bina Marga	33.660.000	11.372.120	33,79%	2	2	100,00%
7754.EBD.025	Layanan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga						
7754.EBD.025.051.A	Pelaksanaan Pengawasan Reviu Laporan Keuangan Bidang Bina Marga	5.600.000	0	0,00%	5	5	125,00%
Total		2.116.198.000	1.291.228.480	61,02%	160	596	372,50%
Efisiensi Anggaran (% realisasi output / %realisasi anggaran)		610,45%					

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan realisasi anggaran Inspektorat II dengan realisasi *output* menunjukkan efisiensi yang tinggi yaitu sebesar 610,45%. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.291.228.480 (61,02%), Inspektorat II mampu menghasilkan *output* sebanyak 596 laporan (372,50% dari target). Kebijakan yang cukup berperan terhadap efisiensi anggaran ini adalah upaya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan beberapa tugas Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya dengan memaksimalkan pelaksanaan tugas di kantor sebelum dilakukan perjalanan dinas ke daerah.



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 pada prinsipnya merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai akuntabilitas terhadap kinerja Inspektorat II pada tahun 2025 dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 dan perubahannya.

Capaian Sasaran Kegiatan (SK) Inspektorat II dalam mendukung capaian Program Dukungan Manajemen Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 87,85% dari Target 76,61%. Capaian *output* kegiatan Inspektorat II sebesar 372,50% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp1.291.228.480 atau 61,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.116.198.000 yang teralokasi dalam DIPA Satker Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Harapan Inspektorat II untuk tahun mendatang adalah dapat meningkatkan kinerja sebagai Aparat Pengawas Intern yang terpercaya, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut akan terus menerus dilaksanakan melalui penguatan integritas, peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta perubahan paradigma dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam mengawal pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum.

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Terdapat beberapa faktor yang mendukung tercapainya beberapa indikator Sasaran Kegiatan 2.2, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II, yaitu:

a. Faktor Eksternal

- 1) Terjalinnnya hubungan yang baik antar pemangku kepentingan lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian PU maupun antar kementerian/ lembaga (K/L);
- 2) Adanya koordinasi yang baik dan berkesinambungan dalam upaya meningkatkan pengendalian internal Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai unit organisasi yang diawasi;
- 3) Adanya kebijakan yang mendukung pengawasan dan akuntabilitas publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan terarah.

b. Faktor Internal

- 1) Komitmen Pimpinan untuk mendorong seluruh pegawai Inspektorat II melaksanakan tugas pengawasan intern yang berkualitas sesuai dengan nilai *core value* ASN yaitu BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);
- 2) Adanya peningkatan pengetahuan pegawai Inspektorat II dalam mendukung pengawasan intern di bidang Bina Marga diantaranya Diklat Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK), Diklat Evaluasi Tata Kelola TI dan Audit TIK, Diklat

Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Diklat Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Diklat Audit BMN, Audit Keamanan SPBE Sektor Pemerintahan, Sosialisasi Pedoman Telaah Sejawat Ekstern, dan Sosialisasi Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;

- 3) Adanya dukungan manajemen pengawasan dari Subbagian Tata Usaha dalam menyediakan data, informasi dan memfasilitasi sarana prasarana serta pengadministrasian untuk membantu kegiatan pengawasan intern dan pelaporan kepada pimpinan;
- 4) Pengimplementasian manajemen risiko dalam mencapai tujuan pencapaian kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur II.

4.1.2 Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian target kinerja Inspektorat II yaitu:

- a. Banyaknya penugasan yang bersifat *urgent* dan menjadi skala prioritas sesuai arahan pimpinan serta tidak dapat ditunda sehingga penyusunan laporan beberapa kegiatan pengawasan tidak dapat diselesaikan tepat waktu;
- b. Nilai Telaah Sejawat Intern Proses AREPP di Inspektorat II belum mencapai target karena terdapat catatan dari evaluator.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan PKPT;
- b. Meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Inspektorat II, berpedoman pada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2024 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR dan melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dalam hal peningkatan tata kelola Pengawasan di Inspektorat II;
- c. Meningkatkan kapabilitas pegawai Inspektorat II dalam mendukung pengawasan intern melalui pendidikan dan pelatihan serta mendorong peran aktif dan kepedulian seluruh auditor dalam setiap kegiatan AREPP Inspektorat II.



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA AWAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh, S.T., M.T.
Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dadang Rukmana
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

DADANG RUKMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	79,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

Anggaran

Rp 2.065.746.000

INSPEKTUR JENDERAL



DADANG RUKMANA

Jakarta, 31 Januari 2025

INSPEKTUR II



NIKMATULLOH, S.T., M.T.

PERJANJIAN KINERJA REVISI KE-1



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh, S.T., M.T.

Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Jakarta, 4 Juli 2025

Pihak Kedua

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	79,00%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.065.746.000

INSPEKTUR JENDERAL



Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Jakarta, 4 Juli 2025

INSPEKTUR II



NIKMATULLOH, S.T., M.T.

PERJANJIAN KINERJA REVISI KE-2



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh, S.T., M.T.
Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

NIKMATULLOH, S.T., M.T.

Jakarta, 30 September 2025
Pihak Kedua

Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	76,61%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.116.198.000

INSPEKTUR JENDERAL


Dr. Ir. MAULIDYA INDAH JUNICA, M.Sc.

Jakarta, 30 September 2025
INSPEKTUR II


NIKMATULLOH, S.T., M.T.



PERJANJIAN KINERJA REVISI AKHIR



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTUR II – INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nikmatulloh
Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Maulidya Indah Junica
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NIKMATULLOH

MAULIDYA INDAH JUNICA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTUR II – INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REVISI

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	76,61%

Kegiatan:

Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Anggaran

Rp 2.116.198.000

INSPEKTUR JENDERAL


MAULIDYA INDAH JUNICA

Jakarta, 29 Desember 2025

INSPEKTUR II


NIKMATULLOH

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT II
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
SK	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II		
1.	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	76,61%	<p>Diperoleh dari nilai kinerja kegiatan penunjang tugas pengawasan pada Inspektorat II dengan bobot masing-masing sub indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dua Puluh Persen (20%) Nilai Hasil Telaah Sejawat Intern Proses AREPP Inspektorat II dari Nilai Telaah Sejawat Internal Antar Inspektorat; 2. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dari Perbandingan realisasi kegiatan pengawasan dengan target pada PKPT dengan pembobotan kegiatan pengawasan terjadwal dan tidak terjadwal; 3. Dua Puluh Persen (20%) Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II dari Perbandingan jumlah pengaduan yang diterima dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pelaksanaan pengaduan; 4. Lima Belas Persen (15%) Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Pengawasan BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal pada Unit Organisasi yang dibina yang dinyatakan telah tuntas, dibandingkan dengan total jumlah rekomendasi; 5. Lima Persen (5%) Tingkat Perencanaan UPKPT Inspektorat II yang dihitung melalui Tingkat pemenuhan Dokumen UPKPT di Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang disusun tepat waktu; 6. Lima Persen (5%) Nilai SAKIP Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat II;
			<ol style="list-style-type: none"> 7. Lima Persen (5%) Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Nilai Evaluasi Efektivitas Penerapan MR UPR T-2 Inspektorat II; 8. Lima Persen (5%) Transformasi Digital Inspektorat II yang dihitung melalui Nilai Hasil Penilaian Transformasi Digital Inspektorat II (Sub IKK Baru); 9. Lima Persen (5%) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II yang dihitung berdasarkan Nilai Pengawasan Kearsipan Inspektorat II (Sub IKK Baru);

INSPEKTUR JENDERAL

Mauidya Indat Junica
MAULIDYA INDAT JUNICA

Jakarta, 23 Desember 2025

INSPEKTUR II

Nikmatulloh
NIKMATULLOH



LAMPIRAN 2
BUKTI DUKUNG CAPAIAN KINERJA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7251539, Surel: itjen@pu.go.id

Nomor : PW 0204-13/449
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko UPR-T2 Inspektorat II Tahun Anggaran 2024

Jakarta, 7 Mei 2025

Yth.
Inspektur II
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko (MR) Unit Pemilik Risiko-T2 (UPR-T2) Inspektorat II Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

- Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor PW 0204-1j/1686 Tanggal 30 Desember 2022 Hal Penyampaian Pedoman Evaluasi Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR;
- Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 223/SPT/Is/2025 Tanggal 3 Maret 2025.

B. Tujuan Evaluasi

Menilai apakah proses MR yang dilakukan oleh UPR telah berjalan efektif, efisiensi, sistemis, terstruktur, komperhensif dan terintegrasi.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilakukan atas penerapan MR pada UPR selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari s.d 31 Desember 2024.

D. Struktur Manajemen Risiko pada UPR

UPR	Nama UPR	Struktur Manajemen UPR
UPR-T2	Inspektorat II	Pemilik Risiko: Nikmatulloh Pengelola Risiko: 1. Nur Aini Utami 2. Frans Pratama 3. I Made Parindra W. 4. Ricki Fajri Sofyan 5. Dimas Bangun Kusuma M. 6. Achirul Aprisal Annas

E. Hasil Evaluasi

- Hasil Reviu Dokumen

Rincian hasil rekapitulasi atas Nilai Tingkat Efektivitas Penerapan MR berdasarkan reviu dokumen adalah sebagai berikut:

No	Area Penilaian	Nilai Subkomponen	Bobot Subkomponen	Bobot Komponen	Nilai Reviu Dokumen
A. INFRASTRUKTUR MR					
1.	Nilai Budaya Sadar Risiko	85	20%	35%	5.95
2.	Nilai Struktur MR	100	20%		7
3.	Nilai Sistem Informasi MR	0	30%		0
4.	Nilai Anggaran MR	100	30%		10.5
B. PROSES MR					
1.	Nilai Komunikasi dan Konsultasi	100	20%	35%	7



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7232366 Faksimile (021) 7220219

Nomor : PA 0101-Sd/1090 Jakarta, 1 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu set
Hal : Pemberitahuan Hasil Penilaian dan Predikat Penilaian Transformasi Digital
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025

Yth. Daftar Penerima Terlampir
di Tempat

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan seluruh peserta dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025. Sehubungan dengan telah selesainya seluruh tahapan Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 telah dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Unit Organisasi, Unit Kerja, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai melalui beberapa tahapan yaitu *Launching Technical Meeting*, Pengumpulan Bukti Dukung, Penilaian Tahap I, Penilaian Tahap II dan Pleno Penetapan Pemenang.
2. Rekap Hasil Penilaian dan Predikat Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 pada lingkup Unit Organisasi, Unit kerja, dan Unit Pelaksana Teknis dapat di akses melalui tautan <https://s.pu.go.id/NTM3/HasilPredikatTD2025>
3. Segala keputusan hasil penilaian oleh Tim Penilai adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Hasil Penilaian Transformasi Digital bertujuan membangun budaya kerja yang inovatif dan berbasis data di Kementerian Pekerjaan Umum dan diharapkan hasil Penilaian Transformasi Digital Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 menjadi bahan evaluasi seluruh peserta dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Transformasi Digital.

Selanjutnya dalam menunjang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, PUSDATIN Kementerian PU berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan prima.

NO	Unor/ Unker/UPT	Total Nilai 2025	Rangking Kategori Unor/Unker/UPT	Predikat
3	Inspektur II;	86,54	9	Sudah Transformasi Digital
	Predikat Unor			
	Inspektorat Jenderal :	Sudah Transformasi Digital		
	Jumlah Predikat Unker			
	Sudah Transformasi Digital :	5		
	Proses Transformasi Digital :	2		
	Belum Transformasi Digital :	0		

LAMPIRAN 3
PENGHARGAAN



LAMPIRAN 4

BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

BERITA ACARA PEMBAHASAN & KESEPAKATAN LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PU TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2025, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit kerja Inspektorat II sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)
SASARAN KEGIATAN 2.2: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II				
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:				
Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	76,61	87,85	114,67
1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II	Nilai	94,50	93,13	98,55
2 Tingkat Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II	%	85	100	117,65
3 Tingkat Penanganan Pengaduan di Inspektorat II	%	85	100	117,65
4 Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan & Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti di Inspektorat II	%	75,5	84,36	111,74
5 Tingkat Perencanaan UPKPT	%	100	100	100,00
6 Nilai SAKIP Inspektorat II	Kategori	A (Nilai 80,70)	A (Nilai 80,80)	100,12
7 Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR-T2 Inspektorat II	Level	4 (Nilai 77)	4 (Nilai 88,64)	115,17
8 Transformasi Digital Inspektorat II	Nilai	30	86,54	288,48
9 Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan Inspektorat II	Nilai	40	55,48	138,70

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian PU Tahun 2025.

Jakarta, 15 Januari 2026

Mengetahui,
Inspektur II



Nikmatullah, ST, MT

Kasubbag Tata Usaha	Koordinator Pengawasan Wilayah Sumatera	Koordinator Pengawasan Wilayah Jawa dan Bali	Koordinator Pengawasan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Koordinator Pengawasan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Maluku Utara	Koordinator Pengawasan Wilayah Papua
					
Nur Aini Utami, S.E., M.Ak.,	Frans Rratama, S.T., M.Sc.	I Made Parindra Wibawa,	Ricki Fajri Sofyan, S.T.,	Dimas Bangun Kusuma	Achiril Aprisal Annas, S.T.,



LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI KEGIATAN

AUDIT

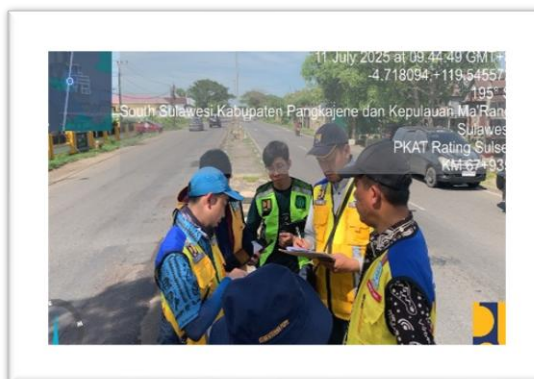
1. Audit Kinerja Berbasis Risiko Program Rating Kondisi Jalan Nasional pada BBPJK Jawa Tengah – DI Yogyakarta



2. Audit Kinerja Berbasis Risiko Program Rating Kondisi Jalan Nasional pada BBPJK Jawa Timur – Bali



3. Audit Kinerja Berbasis Risiko Program Rating Kondisi Jalan Nasional pada BBPJK Sulawesi Selatan



4. Audit Kinerja Berbasis Risiko Program Rating Kondisi Jalan Nasional pada BBPJN Sumatera Utara



5. ADTT Pengaduan Masyarakat Pembangunan Jembatan Gantung Baleng pada Satker PJJN Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan



6. Audit Ketaatan PNBP TA 2024-2025 pada Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur



7. Audit Ketaatan PNBP TA 2024-2025 pada Balai Bahan Jalan dan Perkerasan Jalan



8. ADTT PBJ atas implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Provinsi Sumatera Selatan



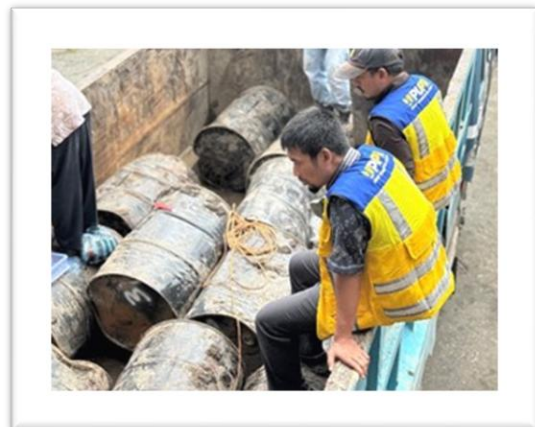
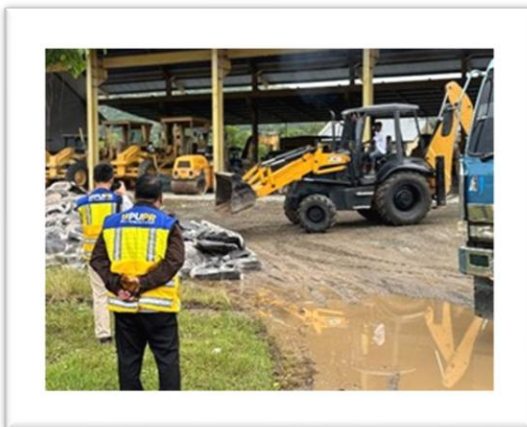
9. Audit Kinerja Level Program Menuju Pengentasan Kemiskinan 0% di Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Sumatera Barat



10. Audit Audit Kinerja Level Program Menuju Pengentasan Kemiskinan 0% di Direktorat Jenderal Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara



11. ADTT Pelaksanaan ADTT Verifikasi Lapangan atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Aceh



REVIU

1. Reviu Koreksi Pencatatan Aset Tanah pada Aset Konsesi Jasa



2. Rapat Pembahasan Reviu Penggunaan Dana Penanganan Mendesak Tanggap Darurat (PMTD)



3. Rapat Pembahasan Reviu Revisi Anggaran berupa Realokasi Anggaran 2025 untuk Inpres Jalan Daerah TA 2025 Tahap II di Lingkungan Ditjen Bina Marga

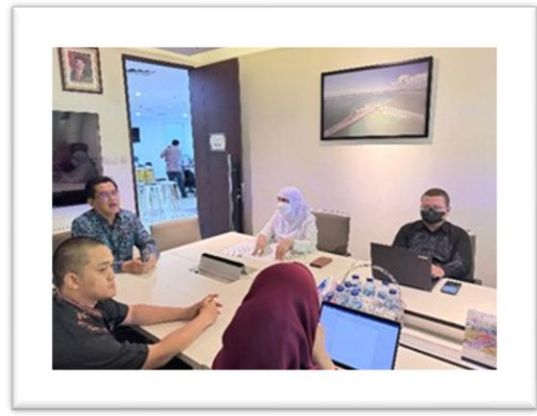


4. Rapat Pembahasan Reviu Revisi Anggaran TA 2026 untuk Pemenuhan RO Khusus pada Ditjen Bina Marga



EVALUASI

1. Pembahasan Evaluasi AKIP TA 2024 pada Inspektorat VI



2. Telaah Sejawat Intern pada Pelaksanaan Audit Kinerja di Inspektorat I Tahun 2025



PEMANTAUAN

1. Rapat Penilaian Tindak Lanjut LHA Inspektorat Jenderal



2. Rapat Pembahasan Rencana Aksi Tindak Lanjut Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Pada Ditjen Bina Marga

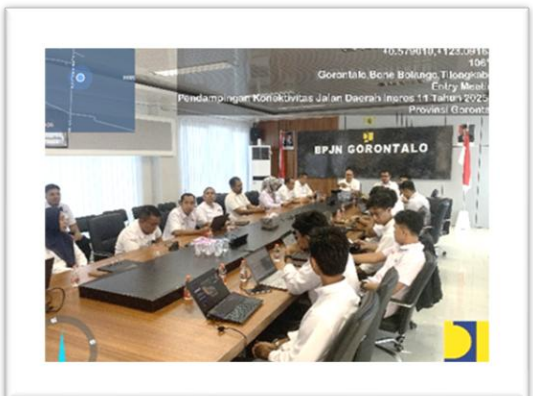


PENGAWASAN LAINNYA

1. Pendampingan Konektivitas Jalan Daerah pada Satker BBPJJN Papua – Papua Pegunungan



2. Pendampingan Konektivitas Jalan Daerah pada Satker BPJJN Gorontalo



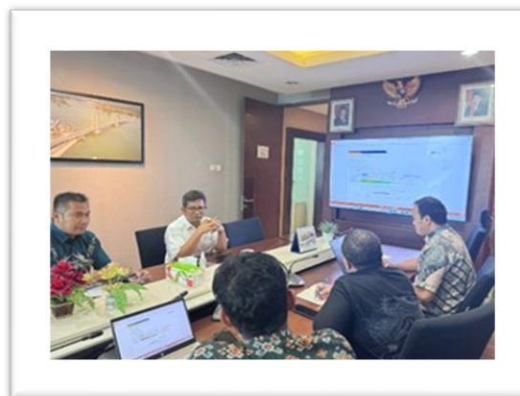
3. Pendampingan Konektivitas Jalan Daerah pada Satker BPJN Kepulauan Riau



4. Pendampingan Konektivitas Jalan Daerah pada Satker BPJN Maluku



5. Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Wanam - Muting, Papua Selatan TA 2025



KOORDINASI KELEMBAGAAN

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Barat



2. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Timur



3. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan



4. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah



3. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Riau



4. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur

